



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan asas keadilan, kepastian, ketertiban, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai perwujudan nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan Standar Harga Satuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran daerah;
 - b. bahwa dalam penyusunan anggaran daerah dan pelaksanaan pembangunan serta penyediaan pelayanan publik memerlukan kepastian dan keseragaman harga dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga Standar Harga Satuan diperlukan untuk mendukung ketertiban, ketepatan, dan kualitas belanja sesuai kebutuhan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Ketentuan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I:
 1. Satuan biaya honorarium;
 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - 2.1. Satuan biaya uang harian;
 - 2.2. Satuan biaya uang representasi; dan
 - 2.3. Satuan biaya penginapan.
 3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- b. Ketentuan yang mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang terdiri atas:
 1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - 2.1. Satuan biaya tiket pesawat;
 - 2.2. Satuan biaya taksi;
 - 2.3. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*);
 - 2.4. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar (*One Way*);
 - 2.5. Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Jember ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*);
 - 2.6. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas.
 3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
 4. Satuan biaya pemeliharaan.

- c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Satuan Biaya Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Satuan Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Satuan Biaya Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. Satuan Biaya Upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. Satuan Biaya Pengadaan Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; dan
 - i. Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 November 2025



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Jember tentang Standar Harga Satuan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - 2.1 Satuan biaya uang harian;
 - 2.2 Satuan biaya uang representasi; dan
 - 2.3 Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Peraturan Bupati Jember ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai :

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.

- 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran

pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan :

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar

Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.
- d. Pemberian honorarium narasumber profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honorarium narasumber sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at-cost)

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Pemberian honorarium moderator profesional dapat melebihi besaran standar honorarium narasumber sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at-cost).

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat

daerah dan/ atau masyarakat. Pemberian honorarium pembawa acara profesional dapat melebihi besaran standar honorarium narasumber sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturannya batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan | Klasifikasi | | |
|----|--|-------------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Pejabat Eselon III | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional | 5 | 6 | 7 |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium

dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten Jember;
- b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten Jember;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten Jember;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten Jember; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten Jember.

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang perjurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.12.1.1 berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

1.12.1.2 berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

1.12.1.3 dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

- 1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara

pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;

- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-------|--|--------|-----------------|
| 1.1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | |
| 1.1.1 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran | | |
| a. | Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | Rp 1.040.000,00 |
| b. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | Rp 1.250.000,00 |
| c. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | Rp 1.450.000,00 |
| d. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | Rp 1.660.000,00 |
| e. | Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | Rp 1.970.000,00 |
| f. | Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | Rp 2.280.000,00 |
| g. | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | Rp 2.590.000,00 |
| h. | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | Rp 3.010.000,00 |
| i. | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | Rp 3.420.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|--------------|--|---------------|-----------------|
| j. | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | Rp 3.840.000,00 |
| k. | Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | Rp 4.250.000,00 |
| l. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | Rp 4.770.000,00 |
| m. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | Rp 5.290.000,00 |
| n. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | Rp 5.810.000,00 |
| o. | Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun | OB | Rp 6.330.000,00 |
| p. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | Rp 7.370.000,00 |
| 1.1.2 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | |
| a. | Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | Rp 1.010.000,00 |
| b. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | Rp 1.210.000,00 |
| c. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | Rp 1.410.000,00 |
| d. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | Rp 1.610.000,00 |
| e. | Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | Rp 1.910.000,00 |
| f. | Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | Rp 2.210.000,00 |
| g. | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | Rp 2.520.000,00 |
| h. | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | Rp 2.920.000,00 |
| i. | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | Rp 3.320.000,00 |
| j. | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | Rp 3.720.000,00 |
| k. | Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | Rp 4.130.000,00 |
| l. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | Rp 4.630.000,00 |
| m. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | Rp 5.130.000,00 |
| n. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | Rp 5.640.000,00 |
| o. | Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun | OB | Rp 6.140.000,00 |
| p. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | Rp 7.140.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|--------------|--|--------|-----------------|
| 1.1.3 | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah | | |
| a. | Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | Rp 400.000,00 |
| b. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | Rp 480.000,00 |
| c. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | Rp 570.000,00 |
| d. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | Rp 660.000,00 |
| e. | Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | Rp 770.000,00 |
| f. | Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | Rp 880.000,00 |
| g. | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | Rp 990.000,00 |
| h. | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | Rp 1.250.000,00 |
| i. | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | Rp 1.520.000,00 |
| j. | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | Rp 1.780.000,00 |
| k. | Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | Rp 2.040.000,00 |
| l. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | Rp 2.440.000,00 |
| m. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | Rp 2.830.000,00 |
| n. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | Rp 3.230.000,00 |
| o. | Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun | OB | Rp 3.620.000,00 |
| p. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | Rp 4.420.000,00 |
| 1.1.4 | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan | | |
| a. | Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | Rp 340.000,00 |
| b. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | Rp 420.000,00 |
| c. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | Rp 500.000,00 |
| d. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | Rp 570.000,00 |
| e. | Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | Rp 670.000,00 |
| f. | Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | Rp 770.000,00 |
| g. | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | Rp 860.000,00 |
| h. | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | Rp 1.090.000,00 |
| i. | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | Rp 1.320.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|--------------|--|--------|-----------------|
| j. | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | Rp 1.550.000,00 |
| k. | Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | Rp 1.780.000,00 |
| l. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | Rp 2.120.000,00 |
| m. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | Rp 2.470.000,00 |
| n. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | Rp 2.810.000,00 |
| o. | Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun | OB | Rp 3.160.000,00 |
| p. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | Rp 3.840.000,00 |
| 1.1.5 | Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu | | |
| a. | Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | Rp 260.000,00 |
| b. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | Rp 310.000,00 |
| c. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | Rp 370.000,00 |
| d. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | Rp 430.000,00 |
| e. | Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | Rp 500.000,00 |
| f. | Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | Rp 570.000,00 |
| g. | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | Rp 640.000,00 |
| h. | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | Rp 810.000,00 |
| i. | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | Rp 980.000,00 |
| j. | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | Rp 1.150.000,00 |
| k. | Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | Rp 1.330.000,00 |
| l. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | Rp 1.580.000,00 |
| m. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | Rp 1.840.000,00 |
| n. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | Rp 2.090.000,00 |
| o. | Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun | OB | Rp 2.350.000,00 |
| p. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | Rp 2.860.000,00 |
| 1.2 | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA | | |
| 1.2.1 | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | OB | Rp 680.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----------------|---|--------|-----------------|
| 1.2.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa | | |
| 1.2.2.1 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi | | |
| a. | Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta | OP | Rp 850.000,00 |
| b. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OP | Rp 1.020.000,00 |
| c. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OP | Rp 1.270.000,00 |
| d. | Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OP | Rp 1.520.000,00 |
| e. | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OP | Rp 1.780.000,00 |
| f. | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | Rp 2.120.000,00 |
| g. | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | Rp 2.450.000,00 |
| h. | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | Rp 2.790.000,00 |
| i. | Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | Rp 3.130.000,00 |
| j. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | Rp 3.580.000,00 |
| k. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | Rp 4.030.000,00 |
| l. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | Rp 4.490.000,00 |
| m. | Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OP | Rp 4.940.000,00 |
| n. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OP | Rp 5.560.000,00 |
| 1.2.2.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang | | |
| a. | Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta | OP | Rp 760.000,00 |
| b. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OP | Rp 920.000,00 |
| c. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OP | Rp 1.140.000,00 |
| d. | Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OP | Rp 1.370.000,00 |
| e. | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OP | Rp 1.600.000,00 |
| f. | Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | Rp 1.910.000,00 |
| g. | Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | Rp 2.210.000,00 |
| h. | Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | Rp 2.520.000,00 |
| i. | Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | Rp 2.820.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----------------|--|--------|-----------------|
| j. | Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | Rp 3.230.000,00 |
| k. | Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | Rp 3.640.000,00 |
| l. | Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | Rp 4.040.000,00 |
| m. | Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OP | Rp 4.450.000,00 |
| n. | Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OP | Rp 5.010.000,00 |
| 1.2.2.3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi | | |
| a. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta | OP | Rp 480.000,00 |
| b. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | OP | Rp 600.000,00 |
| c. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OP | Rp 720.000,00 |
| d. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OP | Rp 910.000,00 |
| e. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OP | Rp 1.090.000,00 |
| f. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OP | Rp 1.270.000,00 |
| g. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | Rp 1.510.000,00 |
| h. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | Rp 1.750.000,00 |
| i. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | Rp 1.990.000,00 |
| j. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | Rp 2.230.000,00 |
| k. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | Rp 2.560.000,00 |
| l. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | Rp 2.880.000,00 |
| m. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | Rp 3.200.000,00 |
| n. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OP | Rp 3.520.000,00 |
| o. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas diatas Rp 1 triliun | OP | Rp 3.960.000,00 |
| p. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | Rp 3.200.000,00 |
| q. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OP | Rp 3.520.000,00 |
| r. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas diatas Rp 1 triliun | OP | Rp 3.960.000,00 |
| 1.2.2.4 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya | | |
| a. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta | OP | Rp 600.000,00 |
| b. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | OP | Rp 720.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|---------------|---|--------|-----------------|
| c. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | OP | Rp 910.000,00 |
| d. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar | OP | Rp 1.090.000,00 |
| e. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | OP | Rp 1.270.000,00 |
| f. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OP | Rp 1.510.000,00 |
| g. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar | OP | Rp 1.750.000,00 |
| h. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar | OP | Rp 1.990.000,00 |
| i. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OP | Rp 2.230.000,00 |
| j. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar | OP | Rp 2.560.000,00 |
| k. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar | OP | Rp 2.880.000,00 |
| l. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar | OP | Rp 3.200.000,00 |
| m. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun | OP | Rp 3.520.000,00 |
| n. | Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 1 triliun | OP | Rp 3.960.000,00 |
| 1.3 | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) | | |
| 1.3.1. | Kepala | OB | Rp 1.000.000,00 |
| 1.3.2. | Sekretaris / Staf Pendukung | OB | Rp 750.000,00 |
| 1.4 | HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA | | |
| 1.4.1. | Honorarium Narasumber / Pembahas | | |
| a. | Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya | OJ | Rp 1.700.000,00 |
| b. | Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | OJ | Rp 1.400.000,00 |
| c. | Pejabat Eselon I / yang disetarakan | OJ | Rp 1.200.000,00 |
| d. | Pejabat Eselon II / yang disetarakan | OJ | Rp 1.000.000,00 |
| e. | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan | OJ | Rp 900.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|---------|---|--------|-----------------|
| 1.4.2. | Honorarium Moderator | OK | Rp 700.000,00 |
| 1.4.3. | Honorarium Pembawa Acara | OK | Rp 400.000,00 |
| 1.4.4. | Honorarium Panitia | | |
| a. | Penanggung Jawab | OK | Rp 450.000,00 |
| b. | Ketua/Wakil ketua | OK | Rp 400.000,00 |
| c. | Sekretaris | OK | Rp 300.000,00 |
| d. | Anggota | OK | Rp 300.000,00 |
| 1.5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| 1.5.1 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| 1.5.1.1 | Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | | |
| a. | Pengarah | OB | Rp 1.500.000,00 |
| b. | Penanggung Jawab | OB | Rp 1.250.000,00 |
| c. | Ketua | OB | Rp 1.000.000,00 |
| d. | Wakil ketua | OB | Rp 850.000,00 |
| e. | Sekretaris | OB | Rp 750.000,00 |
| f. | Anggota | OB | Rp 750.000,00 |
| 1.5.1.2 | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | |
| a. | Pengarah | OB | Rp 750.000,00 |
| b. | Penanggung Jawab | OB | Rp 700.000,00 |
| c. | Ketua | OB | Rp 650.000,00 |
| d. | Wakil ketua | OB | Rp 600.000,00 |
| e. | Sekretaris | OB | Rp 500.000,00 |
| f. | Anggota | OB | Rp 500.000,00 |
| 1.5.2 | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| 1.5.2.1 | Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | |
| a. | Ketua/Wakil Ketua | OB | Rp 250.000,00 |
| b. | Anggota | OB | Rp 220.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|--------------|---|-------------|-----------------|
| 1.6 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA | | |
| 1.6.1 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli | OK | Rp 1.800.000,00 |
| 1.6.2 | Honorarium Beracara | OK | Rp 1.800.000,00 |
| 1.7 | HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL | | |
| a. | SLTA | OB | Rp 2.100.000,00 |
| b. | DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan | OB | Rp 2.400.000,00 |
| c. | Sarjana (S1) | OB | Rp 2.600.000,00 |
| d. | Master {S2) | OB | Rp 2.800.000,00 |
| a. | Doktor (S3) | OB | Rp 3.000.000,00 |
| 1.8 | HONORARIUM ROHANIWAN | OK | Rp 400.000,00 |
| 1.9 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE | | |
| 1.9.1 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal | | |
| a. | Penanggung Jawab | Oter | Rp 500.000,00 |
| b. | Redaktur | Oter | Rp 400.000,00 |
| c. | Penyunting/ Editor | Oter | Rp 300.000,00 |
| d. | Desain Grafis | Oter | Rp 180.000,00 |
| e. | Fotografer | Oter | Rp 180.000,00 |
| f. | Sekretariat | Oter | Rp 150.000,00 |
| g. | Pembuat Artikel | Per Halaman | Rp 200.000,00 |
| 1.9.2 | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah | | |
| a. | Penanggung Jawab | Oter | Rp 400.000,00 |
| b. | Redaktur | Oter | Rp 300.000,00 |
| c. | Penyunting/ Editor | Oter | Rp 250.000,00 |
| d. | Desain Grafis | Oter | Rp 180.000,00 |
| e. | Fotografer | Oter | Rp 180.000,00 |
| f. | Sekretariat | Oter | Rp 150.000,00 |
| g. | Pembuat Artikel | Per Halaman | Rp 100.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|---------------|---|-------------------------|---------------|
| 1.9.3 | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website | | |
| a. | Penanggung Jawab | OB | Rp 500.000,00 |
| b. | Redaktur | OB | Rp 450.000,00 |
| c. | Editor | OB | Rp 400.000,00 |
| d. | Web Admin | OB | Rp 350.000,00 |
| e. | Web Developer | OB | Rp 300.000,00 |
| g. | Pembuat Artikel | Per Halaman | Rp 100.000,00 |
| 1.10 | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN | | |
| 1.10.1 | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar | | |
| a. | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp 150.000,00 |
| b. | Pengawas Ujian | OH | Rp 240.000,00 |
| c. | Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp 5.000,00 |
| 1.10.2 | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah | | |
| a. | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp 190.000,00 |
| b. | Pengawas Ujian | OH | Rp 270.000,00 |
| c. | Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp 7.500,00 |
| 1.11 | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA | | |
| 1.11.1 | Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota | | |
| a. | Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Per bulir Soal | Rp 100.000,00 |
| b. | Telaah Materi Soal | Per bulir Soal | Rp 45.000,00 |
| c. | Telaah Bahasa Soal | Per bulir Soal | Rp 20.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|---------------|---|-----------|-----------------|
| 1.12 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) | | |
| 1.12.1 | Honorarium Penceramah | OJP | Rp 1.000.000,00 |
| 1.12.2 | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | Rp 300.000,00 |
| 1.12.2 | Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP | Rp 200.000,00 |
| 1.12.4 | Honorarium Penyusunan Modul Diklat | Per Modul | Rp 5.000.000,00 |
| 1.12.5 | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat | | |
| a. | Lama Diklat s.d. 5 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp 450.000,00 |
| | 2) Ketua/Wakil ketua | OK | Rp 400.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp 300.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp 300.000,00 |
| b. | Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp 675.000,00 |
| | 2) Ketua/Wakil ketua | OK | Rp 600.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp 450.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp 450.000,00 |
| c. | Lama Diklat lebih dari 30 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp 900.000,00 |
| | 2) Ketua/ Wakil ketua | OK | Rp 800.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp 600.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp 600.000,00 |
| 1.13 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| 1.13.1 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| a. | Pembina | OB | Rp 3.500.000,00 |
| b. | Pengarah | QB | Rp 3.000.000,00 |
| c. | Ketua | OB | Rp 2.500.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|---------------|--|--------|-----------------|
| d. | Wakil Ketua | OB | Rp 2.000.000,00 |
| e. | Sekretaris | OB | Rp 1.500.000,00 |
| f. | Anggota | OB | Rp 1.300.000,00 |
| 1.13.2 | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| a. | Ketua | OB | Rp 1.000.000,00 |
| b. | Sekretaris | OB | Rp 900.000,00 |
| c. | Anggota | OB | Rp 600.000,00 |
| 1.14 | Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah | | |
| a. | Pengurus Barang Pengelola | OB | Rp 500.000,00 |
| b. | Pembantu Pengurus Barang Pengelola | OB | Rp 450.000,00 |
| c. | Pengurus Barang Pengguna | OB | Rp 400.000,00 |
| d. | Pembantu Pengurus Barang Pengguna | OB | Rp 350.000,00 |
| e. | Pengurus Barang Pembantu | OB | Rp 300.000,00 |

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN

2.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- 2) Perjalanan dinas dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil dengan melampirkan bukti pengeluaran biaya riil berupa struk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dan Biaya transportasi umum lainnya (baik pembayaran secara Online maupun non online).

- 3) Untuk perjalanan dinas di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.
- 4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 5) Uang Harian Pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang dilaksanakan di dalam dan di luar kantor diberikan kepada APIP dibayarkan setinggi-tingginya Rp.160.000.- per hari.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

| NO. | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT |
|-----|------------------|--------|---------------|---|---------------|
| 1. | ACEH | OH | Rp 360.000,00 | Rp 140.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 2. | SUMATERA UTARA | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 3. | RIAU | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 5. | JAMBI | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 6. | SUMATERA BARAT | OH | Rp 380.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | OH | Rp 380.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 8. | LAMPUNG | OH | Rp 380.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 9. | BENGKULU | OH | Rp 380.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | OH | Rp 410.000,00 | Rp 160.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 11. | BANTEN | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 12. | JAWA BARAT | OH | Rp 430.000,00 | Rp 170.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 13. | D.K.I. JAKARTA | OH | Rp 530.000,00 | Rp 210.000,00 | Rp 160.000,00 |
| 14. | JAWA TENGAH | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | OH | Rp 420.000,00 | Rp 170.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 16. | JAWA TIMUR | OH | Rp 410.000,00 | Rp 160.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 17. | BALI | OH | Rp 480.000,00 | Rp 190.000,00 | Rp 140.000,00 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | Rp 440.000,00 | Rp 180.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | Rp 430.000,00 | Rp 170.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | OH | Rp 380.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | OH | Rp 360.000,00 | Rp 140.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp 380.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | OH | Rp 430.000,00 | Rp 170.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA | OH | Rp 430.000,00 | Rp 170.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 25. | SULAWESI UTARA | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 26. | GORONTALO | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 27. | SULAWESI BARAT | OH | Rp 410.000,00 | Rp 160.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 28. | SULAWESI SELATAN | OH | Rp 430.000,00 | Rp 170.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 29. | SULAWESI TENGAH | OH | Rp 370.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | OH | Rp 380.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 31. | MALUKU | OH | Rp 380.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 110.000,00 |
| 32. | MALUKU UTARA | OH | Rp 430.000,00 | Rp 170.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 33. | PAPUA | OH | Rp 580.000,00 | Rp 230.000,00 | Rp 170.000,00 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 34. | PAPUA BARAT | OH | Rp 480.000,00 | Rp 190.000,00 | Rp 140.000,00 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | OH | Rp 480.000,00 | Rp 190.000,00 | Rp 140.000,00 |
| 36. | PAPUA TENGAH | OH | Rp 580.000,00 | Rp 230.000,00 | Rp 170.000,00 |
| 37. | PAPUA SELATAN | OH | Rp 580.000,00 | Rp 230.000,00 | Rp 170.000,00 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | OH | Rp 580.000,00 | Rp 230.000,00 | Rp 170.000,00 |

2.2 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Uang representasi perjalan dinas hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Satuan Biaya Representasi terinci pada tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO. | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|-----|-----------------------------------|--------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH | Rp 250.000,00 | Rp 125.000,00 |
| 2 | PEJABAT ESELON I | OH | Rp 200.000,00 | Rp 100.000,00 |
| 3 | PEJABAT ESELON II | OH | Rp 150.000,00 | Rp 75.000,00 |

2.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp) | ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp) | PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp) | PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II dan I (Rp) |
|----|---------------------|--------|---|--|---|---|
| 1 | ACEH | OH | 4.420.000 | 3.526.000 | 1.533.000 | 770.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 4.960.000 | 2.195.000 | 1.100.000 | 699.000 |
| 3 | RIAU | OH | 3.820.000 | 3.119.000 | 1.650.000 | 852.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 5.344.000 | 2.318.000 | 1.297.000 | 792.000 |
| 5 | JAMBI | OH | 5.000.000 | 4.102.000 | 1.225.000 | 580.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 5.236.000 | 3.332.000 | 1.353.000 | 701.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 5.850.000 | 3.083.000 | 1.955.000 | 861.000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 4.491.000 | 2.488.000 | 1.425.000 | 580.000 |
| 9 | BENGKULU | OH | 2.140.000 | 1.628.000 | 1.546.000 | 692.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 3.827.000 | 2.838.000 | 1.957.000 | 649.000 |
| 11 | BANTEN | OH | 5.725.000 | 2.373.000 | 1.204.000 | 724.000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | 5.381.000 | 2.755.000 | 1.201.000 | 686.000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | OH | 8.720.000 | 2.063.000 | 992.000 | 730.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | 5.303.000 | 1.850.000 | 1.201.000 | 750.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | OH | 5.017.000 | 2.695.000 | 1.384.000 | 845.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 4.449.000 | 2.007.000 | 1.153.000 | 814.000 |
| 17 | B A L I | OH | 6.848.000 | 2.433.000 | 1.685.000 | 1.138.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 4.375.000 | 2.648.000 | 1.418.000 | 907.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 3.750.000 | 2.133.000 | 1.355.000 | 688.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 2.654.000 | 1.923.000 | 1.125.000 | 538.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 4.901.000 | 3.391.000 | 1.160.000 | 659.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 4.797.000 | 3.316.000 | 1.500.000 | 697.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 1.507.000 | 804.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | 4.000.000 | 2.735.000 | 1.507.000 | 904.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 4.919.000 | 2.290.000 | 1.207.000 | 978.000 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | GORONTALO | OH | 4.168.000 | 3.107.000 | 1.606.000 | 955.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 4.076.000 | 3.098.000 | 1.344.000 | 704.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | 4.820.000 | 1.938.000 | 1.423.000 | 745.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 2.309.000 | 2.027.000 | 1.679.000 | 951.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | 3.088.800 | 2.574.000 | 1.297.000 | 786.000 |
| 31 | MALUKU | OH | 3.467.000 | 3.240.000 | 1.059.000 | 667.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 4.611.600 | 3.843.000 | 1.160.000 | 605.000 |
| 33 | P A P U A | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000 |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000 |
| 36 | PAPUA TENGAH | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 37 | PAPUA SELATAN | OH | 5.673.000 | 4.877.000 | 3.706.000 | 1.526.000 |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | OH | 5.711.000 | 4.911.000 | 3.731.000 | 1.536.000 |

- 1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
- 2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dengan melampirkan surat pernyataan tidak menginap.
- 3) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilakukan oleh Kepala Daerah, kepada ajudan Kepala Daerah dan personil yang mengikutinya dapat menginap pada hotel yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana yang di atur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi I (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang ; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci dalam Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|----|------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Aceh | OP | Rp 453.000,00 | Rp 663.000,00 | Rp 1.732.000,00 | Rp 1.116.000,00 |
| 2 | Sumatera Utara | OP | Rp 451.000,00 | Rp 675.000,00 | Rp 1.350.000,00 | Rp 1.126.000,00 |
| 3 | Riau | OP | Rp 319.000,00 | Rp 582.000,00 | Rp 1.229.000,00 | Rp 901.000,00 |
| 4 | Kepulauan Riau | OP | Rp 471.000,00 | Rp 634.000,00 | Rp 1.484.000,00 | Rp 1.105.000,00 |
| 5 | Jambi | OP | Rp 465.000,00 | Rp 595.000,00 | Rp 1.538.000,00 | Rp 1.060.000,00 |
| 6 | Sumatera Barat | OP | Rp 351.000,00 | Rp 502.000,00 | Rp 1.492.000,00 | Rp 853.000,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | OP | Rp 489.000,00 | Rp 718.000,00 | Rp 1.448.000,00 | Rp 1.207.000,00 |
| 8 | Lampung | OP | Rp 452.000,00 | Rp 577.000,00 | Rp 1.200.000,00 | Rp 1.029.000,00 |
| 9 | Bengkulu | OP | Rp 383.000,00 | Rp 538.000,00 | Rp 1.262.000,00 | Rp 921.000,00 |
| 10 | Bangka Belitung | OP | Rp 555.000,00 | Rp 714.000,00 | Rp 1.632.000,00 | Rp 1.269.000,00 |
| 11 | Banten | OP | Rp 678.000,00 | Rp 930.000,00 | Rp 1.752.000,00 | Rp 1.608.000,00 |
| 12 | Jawa Barat | OP | Rp 567.000,00 | Rp 799.000,00 | Rp 1.914.000,00 | Rp 1.366.000,00 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|----|---------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | D.K. I. Jakarta | OP | Rp 760.000,00 | Rp 993.000,00 | Rp 2.257.000,00 | Rp 1.753.000,00 |
| 14 | Jawa Tengah | OP | Rp 426.000,00 | Rp 738.000,00 | Rp 1.576.000,00 | Rp 1.164.000,00 |
| 15 | D.I. Yogyakarta | OP | Rp 458.000,00 | Rp 607.000,00 | Rp 1.470.000,00 | Rp 1.065.000,00 |
| 16 | Jawa Timur | OP | Rp 442.000,00 | Rp 710.000,00 | Rp 2.159.000,00 | Rp 1.152.000,00 |
| 17 | Bali | OP | Rp 737.000,00 | Rp 907.000,00 | Rp 2.523.000,00 | Rp 1.644.000,00 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OP | Rp 503.000,00 | Rp 800.000,00 | Rp 1.413.000,00 | Rp 1.303.000,00 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OP | Rp 642.000,00 | Rp 1.046.000,00 | Rp 2.013.000,00 | Rp 1.688.000,00 |
| 20 | Kalimantan Barat | OP | Rp 462.000,00 | Rp 617.000,00 | Rp 1.247.000,00 | Rp 1.079.000,00 |
| 21 | Kalimantan Tengah | OP | Rp 455.000,00 | Rp 679.000,00 | Rp 2.092.200,00 | Rp 1.134.000,00 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OP | Rp 380.000,00 | Rp 545.000,00 | Rp 1.340.900,00 | Rp 925.000,00 |
| 23 | Kalimantan Timur | OP | Rp 423.000,00 | Rp 750.000,00 | Rp 1.250.000,00 | Rp 1.173.000,00 |
| 24 | Kalimantan Utara | OP | Rp 393.000,00 | Rp 722.700,00 | Rp 1.763.300,00 | Rp 1.115.700,00 |
| 25 | Sulawesi Utara | OP | Rp 490.000,00 | Rp 620.000,00 | Rp 1.250.000,00 | Rp 1.110.000,00 |
| 26 | Gorontalo | OP | Rp 390.000,00 | Rp 562.000,00 | Rp 2.296.800,00 | Rp 952.000,00 |
| 27 | Sulawesi Barat | OP | Rp 390.000,00 | Rp 574.000,00 | Rp 1.301.000,00 | Rp 964.000,00 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OP | Rp 403.000,00 | Rp 583.000,00 | Rp 2.218.000,00 | Rp 986.000,00 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OP | Rp 440.000,00 | Rp 652.000,00 | Rp 1.672.000,00 | Rp 1.092.000,00 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OP | Rp 510.000,00 | Rp 552.000,00 | Rp 1.335.000,00 | Rp 949.000,00 |
| 31 | Maluku | OP | Rp 463.000,00 | Rp 638.000,00 | Rp 1.881.000,00 | Rp 1.101.000,00 |
| 32 | Maluku Utara | OP | Rp 575.000,00 | Rp 693.000,00 | Rp 1.220.000,00 | Rp 1.268.000,00 |
| 33 | Papua | OP | Rp 482.000,00 | Rp 768.000,00 | Rp 2.063.000,00 | Rp 1.250.000,00 |
| 34 | Papua Barat | OP | Rp 503.000,00 | Rp 728.000,00 | Rp 1.952.000,00 | Rp 1.231.000,00 |
| 35 | Papua Barat Daya | OP | Rp 503.000,00 | Rp 728.000,00 | Rp 1.952.000,00 | Rp 1.231.000,00 |
| 36 | Papua Tengah | OP | Rp 482.000,00 | Rp 768.000,00 | Rp 2.063.000,00 | Rp 1.250.000,00 |
| 37 | Papua Selatan | OP | Rp 709.000,00 | Rp 1.129.000,00 | Rp 3.033.000,00 | Rp 1.838.000,00 |
| 38 | Papua Pegunungan | OP | Rp 739.000,00 | Rp 1.070.000,00 | Rp 2.869.000,00 | Rp 1.809.000,00 |

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|----|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Aceh | OP | Rp 413.000,00 | Rp 575.000,00 | Rp 1.075.000,00 | Rp 988.000,00 |
| 2 | Sumatera Utara | OP | Rp 411.000,00 | Rp 511.000,00 | Rp 1.011.000,00 | Rp 922.000,00 |
| 3 | Riau | OP | Rp 279.000,00 | Rp 432.000,00 | Rp 1.084.000,00 | Rp 711.000,00 |
| 4 | Kepulauan Riau | OP | Rp 431.000,00 | Rp 531.000,00 | Rp 1.170.000,00 | Rp 962.000,00 |
| 5 | Jambi | OP | Rp 425.000,00 | Rp 525.000,00 | Rp 1.298.000,00 | Rp 950.000,00 |
| 6 | Sumatera Barat | OP | Rp 311.000,00 | Rp 432.000,00 | Rp 987.000,00 | Rp 743.000,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | OP | Rp 391.000,00 | Rp 502.000,00 | Rp 1.030.000,00 | Rp 893.000,00 |
| 8 | Lampung | OP | Rp 421.000,00 | Rp 512.000,00 | Rp 950.000,00 | Rp 933.000,00 |
| 9 | Bengkulu | OP | Rp 343.000,00 | Rp 468.000,00 | Rp 1.062.000,00 | Rp 811.000,00 |
| 10 | Bangka Belitung | OP | Rp 449.000,00 | Rp 582.000,00 | Rp 1.115.000,00 | Rp 1.031.000,00 |
| 11 | Banten | OP | Rp 502.000,00 | Rp 632.000,00 | Rp 1.201.000,00 | Rp 1.134.000,00 |
| 12 | Jawa Barat | OP | Rp 474.000,00 | Rp 692.000,00 | Rp 1.110.000,00 | Rp 1.166.000,00 |
| 13 | D.K. I. Jakarta | OP | Rp 542.000,00 | Rp 667.000,00 | Rp 1.347.000,00 | Rp 1.209.000,00 |
| 14 | Jawa Tengah | OP | Rp 303.000,00 | Rp 474.000,00 | Rp 919.000,00 | Rp 777.000,00 |
| 15 | D.I. Yogyakarta | OP | Rp 332.000,00 | Rp 507.000,00 | Rp 1.204.000,00 | Rp 839.000,00 |
| 16 | Jawa Timur | OP | Rp 398.000,00 | Rp 623.000,00 | Rp 1.784.000,00 | Rp 1.021.000,00 |
| 17 | Bali | OP | Rp 488.000,00 | Rp 652.000,00 | Rp 1.569.000,00 | Rp 1.140.000,00 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OP | Rp 488.000,00 | Rp 713.000,00 | Rp 1.213.000,00 | Rp 1.201.000,00 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OP | Rp 463.000,00 | Rp 602.000,00 | Rp.1.294.000,00 | Rp 1.065.000,00 |
| 20 | Kalimantan Barat | OP | Rp 422.000,00 | Rp 547.000,00 | Rp 1.047.000,00 | Rp 969.000,00 |
| 21 | Kalimantan Tengah | OP | Rp 415.000,00 | Rp 609.000,00 | Rp 1.902.000,00 | Rp 1.024.000,00 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OP | Rp 340.000,00 | Rp 475.000,00 | Rp 1.219.000,00 | Rp 815.000,00 |
| 23 | Kalimantan Timur | OP | Rp 324.000,00 | Rp 478.000,00 | Rp 1.050.000,00 | Rp 802.000,00 |
| 24 | Kalimantan Utara | OP | Rp 373.000,00 | Rp 657.000,00 | Rp 1.603.000,00 | Rp 1.030.000,00 |
| 25 | Sulawesi Utara | OP | Rp 450.000,00 | Rp 550.000,00 | Rp 1.050.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 26 | Gorontalo | OP | Rp 350.000,00 | Rp 492.000,00 | Rp 2.088.000,00 | Rp 842.000,00 |
| 27 | Sulawesi Barat | OP | Rp 350.000,00 | Rp 504.000,00 | Rp 1.101.000,00 | Rp 854.000,00 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OP | Rp 363.000,00 | Rp 513.000,00 | Rp 1.574.000,00 | Rp 876.000,00 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OP | Rp 400.000,00 | Rp 582.000,00 | Rp 1.520.000,00 | Rp 982.000,00 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OP | Rp 464.000,00 | Rp 604.000,00 | Rp 1.171.000,00 | Rp 1.068.000,00 |
| 31 | Maluku | OP | Rp 423.000,00 | Rp 568.000,00 | Rp 1.710.000,00 | Rp 991.000,00 |
| 32 | Maluku Utara | OP | Rp 523.000,00 | Rp 623.000,00 | Rp 1.050.000,00 | Rp 1.146.000,00 |
| 33 | Papua | OP | Rp 442.000,00 | Rp 698.000,00 | Rp 1.863.000,00 | Rp 1.140.000,00 |
| 34 | Papua Barat | OP | Rp 463.000,00 | Rp 658.000,00 | Rp 1.752.000,00 | Rp 1.121.000,00 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|----|------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Papua Barat Daya | OP | Rp 463.000,00 | Rp 658.000,00 | Rp 1.752.000,00 | Rp 1.121.000,00 |
| 36 | Papua Tengah | OP | Rp 442.000,00 | Rp 698.000,00 | Rp 1.863.000,00 | Rp 1.140.000,00 |
| 37 | Papua Selatan | OP | Rp 650.000,00 | Rp 1.026.000,00 | Rp 2.739.000,00 | Rp 1.676.000,00 |
| 38 | Papua Pegunungan | OP | Rp 650.000,00 | Rp 1.026.000,00 | Rp 2.739.000,00 | Rp 1.676.000,00 |

3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam mengalokasikan uang harian kegiatan fullboard, fullday dan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kegiatan pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat di alokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

| NO. | PROVINSI | SATUAN | FULLBOARD | FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA | RESIDENCE DI DALAM KOTA |
|-----|------------------|--------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Aceh | OH | Rp 120.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 2 | Sumatera Utara | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 3 | Riau | OH | Rp 130.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 4 | Kepulauan Riau | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 5 | Jambi | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 6 | Sumatera Barat | OH | Rp 120.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | OH | Rp 120.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 8 | Lampung | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 9 | Bengkulu | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 11 | Banten | OH | Rp 120.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 12 | Jawa Barat | OH | Rp 150.000,00 | Rp 105.000,00 | Rp 150.000,00 |
| 13 | D.K. I. Jakarta | OH | Rp 180.000,00 | Rp 130.000,00 | Rp 180.000,00 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 15 | D.I. Yogyakarta | OH | Rp 140.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 140.000,00 |
| 16 | Jawa Timur | OH | Rp 140.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 140.000,00 |
| 17 | Bali | OH | Rp 160.000,00 | Rp 115.000,00 | Rp 160.000,00 |

| NO. | PROVINSI | SATUAN | FULLBOARD | FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA | RESIDENCE DI DALAM KOTA |
|-----|---------------------|--------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp 150.000,00 | Rp 105.000,00 | Rp 150.000,00 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp 140.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 140.000,00 |
| 20 | Kalimantan Barat | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 21 | Kali Mantan Tengah | OH | Rp 120.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 23 | Kalimantan Timur | OH | Rp 150.000,00 | Rp 105.000,00 | Rp 150.000,00 |
| 24 | Kalimantan Utara | OH | Rp 150.000,00 | Rp 105.000,00 | Rp 150.000,00 |
| 25 | Sulawesi Utara | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 26 | Gorontalo | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 27 | Sulawesi Barat | OH | Rp 120.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OH | Rp 150.000,00 | Rp 105.000,00 | Rp 150.000,00 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 31 | Maluku | OH | Rp 120.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 120.000,00 |
| 32 | Maluku Utara | OH | Rp 130.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 130.000,00 |
| 33 | Papua | OH | Rp 200.000,00 | Rp 140.000,00 | Rp 200.000,00 |
| 34 | Papua Barat | OH | Rp 160.000,00 | Rp 115.000,00 | Rp 160.000,00 |
| 35 | Papua Barat Daya | OH | Rp 160.000,00 | Rp 115.000,00 | Rp 160.000,00 |
| 36 | Papua Tengah | OH | Rp 200.000,00 | Rp 140.000,00 | Rp 200.000,00 |
| 37 | Papua Selatan | OH | Rp 200.000,00 | Rp 140.000,00 | Rp 200.000,00 |
| 38 | Papua Pegunungan | OH | Rp 200.000,00 | Rp 140.000,00 | Rp 200.000,00 |

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, Tabel 1.11, dan Tabel 1.12.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|-------------------|
| 1. | KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD | Unit | Rp 878.913.000,00 |
| 2. | PEJABAT ESELON II | Unit | Rp 764.021.000,00 |

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

| NO. | JENIS KENDARAAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|-----------------|--------|-------------------|
| 1. | PICK UP | Unit | Rp 263.849.000,00 |
| 2. | MINIBUS | Unit | Rp 376.363.000,00 |
| 3. | DOUBLE GARDAN | Unit | Rp 513.056.000,00 |

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS


| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|-----------------------------|--------|---------------------|
| 1. | Roda 4 dan/ atau Bus Kecil | Unit | Rp 498.810.000,00 |
| 2. | Roda 6 dan/ atau Bus Sedang | Unit | Rp 768.820.000,00 |
| 3. | Roda 6 dan/ atau Bus Besar | Unit | Rp 1.268.200.000,00 |

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU
LAPANGAN RODA 2 (DUA)

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|-----------------------|--------|------------------|
| 1. | KENDARAAN OPERASIONAL | Unit | Rp 38.461.000,00 |
| 2. | KENDARAAN LAPANGAN | Unit | Rp 43.340.000,00 |

TABEL 1.12
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|------------------------------|--------|----------------|
| 1. | Pejabat Eselon I | Unit | Rp 966.804.000 |
| 2. | Pejabat Eselon II | Unit | Rp 746.110.000 |
| 3. | Kendaraan Operasional Kantor | Unit | Rp 430.080.000 |
| 4. | Kendaraan Roda Dua | Unit | Rp 28.000.000 |


BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Jember tentang Standar Harga Satuan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - 2.1. Satuan biaya tiket pesawat;
 - 2.2. Satuan biaya taksi;
 - 2.3. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way);
 - 2.4. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar (One Way);
 - 2.5. Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Jember ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way);
 - 2.6. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|--------------------------|--------|-----------------|
| 1. | Honorarium Narasumber | OJ | Rp 1.700.000,00 |
| 2. | Honorarium Moderator | OK | Rp 1.000.000,00 |
| 3. | Honorarium Pembawa Acara | OK | Rp 750.000,00 |

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan perjalanan dinas dipertanggung jawabkan secara **at cost (biaya riil)**.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Jember Tentang Standar harga Satuan mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|---------|----------------|---------------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | JAKARTA | AMBON | 13.285.000,00 | 7.081.000,00 |
| 2 | JAKARTA | BALIKPAPAN | 7.412.000,00 | 3.797.000,00 |
| 3 | JAKARTA | BANDA ACEH | 7.519.000,00 | 4.492.000,00 |
| 4 | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | 2.407.000,00 | 1.583.000,00 |
| 5 | JAKARTA | BANJARMASIN | 5.252.000,00 | 2.995.000,00 |
| 6 | JAKARTA | BATAM | 4.867.000,00 | 2.888.000,00 |
| 7 | JAKARTA | BENGKULU | 4.364.000,00 | 2.621.000,00 |
| 8 | JAKARTA | BIAK | 14.065.000,00 | 7.519.000,00 |
| 9 | JAKARTA | DENPASAR | 5.305.000,00 | 3.262.000,00 |
| 10 | JAKARTA | GORONTALO | 7.231.000,00 | 4.824.000,00 |
| 11 | JAKARTA | JAMBI | 4.065.000,00 | 2.460.000,00 |
| 12 | JAKARTA | JAYAPURA | 14.568.000,00 | 8.193.000,00 |
| 13 | JAKARTA | YOGYAKARTA | 4.107.000,00 | 2.268.000,00 |
| 14 | JAKARTA | KENDARI | 7.658.000,00 | 4.182.000,00 |
| 15 | JAKARTA | KUPANG | 9.413.000,00 | 5.081.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 16 | JAKARTA | MAKASSAR | 7.444.000,00 | 3.829.000,00 |
| 17 | JAKARTA | MALANG | 4.599.000,00 | 2.695.000,00 |
| 18 | JAKARTA | MAMUJU | 7.295.000,00 | 4.867.000,00 |
| 19 | JAKARTA | MANADO | 10.824.000,00 | 5.102.000,00 |
| 20 | JAKARTA | MANOKWARI | 16.226.000,00 | 10.824.000,00 |
| 21 | JAKARTA | MATARAM | 5.316.000,00 | 3.230.000,00 |
| 22 | JAKARTA | MEDAN | 7.252.000,00 | 3.808.000,00 |
| 23 | JAKARTA | PADANG | 5.530.000,00 | 2.952.000,00 |
| 24 | JAKARTA | PALANGKARAYA | 4.984.000,00 | 2.984.000,00 |
| 25 | JAKARTA | PALEMBANG | 3.861.000,00 | 2.268.000,00 |
| 26 | JAKARTA | PALU | 9.348.000,00 | 5.113.000,00 |
| 27 | JAKARTA | PANGKAL PINANG | 3.412.000,00 | 2.139.000,00 |
| 28 | JAKARTA | PEKANBARU | 5.583.000,00 | 3.016.000,00 |
| 29 | JAKARTA | PONTIANAK | 4.353.000,00 | 2.781.000,00 |
| 30 | JAKARTA | SEMARANG | 3.861.000,00 | 2.182.000,00 |
| 31 | JAKARTA | SOLO | 3.861.000,00 | 2.342.000,00 |
| 32 | JAKARTA | SURABAYA | 5.466.000,00 | 2.674.000,00 |
| 33 | JAKARTA | TERNATE | 10.001.000,00 | 6.664.000,00 |
| 34 | JAKARTA | TIMIKA | 13.830.000,00 | 7.487.000,00 |
| 35 | JAKARTA | TANJUNG SELOR | 7.424.000,00 | 4.057.000,00 |
| 36 | AMBON | DENPASAR | 8.054.000,00 | 4.471.000,00 |
| 37 | AMBON | JAYAPURA | 7.434.000,00 | 4.161.000,00 |
| 38 | AMBON | KENDARI | 4.824.000,00 | 2.856.000,00 |
| 39 | AMBON | MAKASSAR | 6.022.000,00 | 3.455.000,00 |
| 40 | AMBON | MANO KWARI | 5.177.000,00 | 3.027.000,00 |
| 41 | AMBON | PALU | 6.140.000,00 | 3.508.000,00 |
| 42 | AMBON | SORONG | 3.637.000,00 | 2.257.000,00 |
| 43 | AMBON | SURABAYA | 8.803.000,00 | 4.845.000,00 |
| 44 | AMBON | TERNATE | 4.022.000,00 | 2.449.000,00 |
| 45 | BALIKPAPAN | BANDA ACEH | 12.739.000,00 | 6.749.000,00 |
| 46 | BALIKPAPAN | BATAM | 10.354.000,00 | 5.305.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|----------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 47 | BALIKPAPAN | DENPASAR | 10.739.000,00 | 5.648.000,00 |
| 48 | BALIKPAPAN | JAYAPURA | 19.071.000,00 | 10.086.000,00 |
| 49 | BALIKPAPAN | YOGYAKARTA | 9.669.000,00 | 4.749.000,00 |
| 50 | BALIKPAPAN | MAKASSAR | 12.664.000,00 | 6.150.000,00 |
| 51 | BALIKPAPAN | MANADO | 15.702.000,00 | 7.295.000,00 |
| 52 | BALIKPAPAN | MEDAN | 12.493.000,00 | 6.140.000,00 |
| 53 | BALIKPAPAN | PADANG | 10.942.000,00 | 5.369.000,00 |
| 54 | BALIKPAPAN | PALEMBANG | 9.445.000,00 | 4.749.000,00 |
| 55 | BALIKPAPAN | PEKANBARU | 10.996.000,00 | 5.423.000,00 |
| 56 | BALIKPAPAN | SEMARANG | 9.445.000,00 | 4.674.000,00 |
| 57 | BALIKPAPAN | SOLO | 9.445.000,00 | 4.813.000,00 |
| 58 | BALIKPAPAN | SURABAYA | 10.889.000,00 | 5.113.000,00 |
| 59 | BALIKPAPAN | TIMIKA | 18.408.000,00 | 9.445.000,00 |
| 60 | BANDA ACEH | DENPASAR | 10.835.000,00 | 6.279.000,00 |
| 61 | BANDA ACEH | JAYAPURA | 19.167.000,00 | 10.717.000,00 |
| 62 | BANDA ACEH | YOGYAKARTA | 9.765.000,00 | 5.380.000,00 |
| 63 | BANDA ACEH | MAKASSAR | 12.760.000,00 | 6.781.000,00 |
| 64 | BANDA ACEH | MANADO | 15.798.000,00 | 7.926.000,00 |
| 65 | BANDA ACEH | PONTIANAK | 9.990.000,00 | 5.840.000,00 |
| 66 | BANDA ACEH | SEMARANG | 9.530.000,00 | 5.305.000,00 |
| 67 | BANDA ACEH | SOLO | 9.530.000,00 | 5.444.000,00 |
| 68 | BANDA ACEH | SURABAYA | 10.985.000,00 | 5.744.000,00 |
| 69 | BANDA ACEH | TIMIKA | 18.504.000,00 | 10.076.000,00 |
| 70 | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN | 8.129.000,00 | 4.129.000,00 |
| 71 | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH | 8.225.000,00 | 4.760.000,00 |
| 72 | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN | 6.193.000,00 | 3.412.000,00 |
| 73 | BANDAR LAMPUNG | BATAM | 5.840.000,00 | 3.316.000,00 |
| 74 | BANDAR LAMPUNG | BIAK | 14.119.000,00 | 7.487.000,00 |
| 75 | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR | 6.236.000,00 | 3.647.000,00 |
| 76 | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA | 14.568.000,00 | 8.097.000,00 |
| 77 | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA | 5.155.000,00 | 2.760.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 78 | BANDAR LAMPUNG | KENDARI | 8.354.000,00 | 4.482.000,00 |
| 79 | BANDAR LAMPUNG | MAKASSAR | 8.161.000,00 | 4.161.000,00 |
| 80 | BANDAR LAMPUNG | MALANG | 5.594.000,00 | 3.134.000,00 |
| 81 | BANDAR LAMPUNG | MANADO | 11.199.000,00 | 5.305.000,00 |
| 82 | BANDAR LAMPUNG | MATARAM | 6.246.000,00 | 3.626.000,00 |
| 83 | BANDAR LAMPUNG | MEDAN | 7.979.000,00 | 4.150.000,00 |
| 84 | BANDAR LAMPUNG | PADANG | 6.439.000,00 | 3.380.000,00 |
| 85 | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA | 5.947.000,00 | 3.401.000,00 |
| 86 | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG | 4.931.000,00 | 2.760.000,00 |
| 87 | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU | 6.482.000,00 | 3.433.000,00 |
| 88 | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK | 5.380.000,00 | 3.220.000,00 |
| 89 | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG | 4.931.000,00 | 2.685.000,00 |
| 90 | BANDAR LAMPUNG | SOLO | 4.931.000,00 | 2.824.000,00 |
| 91 | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA | 6.386.000,00 | 3.123.000,00 |
| 92 | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA | 13.905.000,00 | 7.455.000,00 |
| 93 | BANDUNG | BATAM | 6.289.000,00 | 3.583.000,00 |
| 94 | BANDUNG | DENPASAR | 5.626.000,00 | 3.252.000,00 |
| 96 | BANDUNG | JAMBI | 5.006.000,00 | 2.941.000,00 |
| 97 | BANDUNG | YOGYAKARTA | 3.369.000,00 | 2.129.000,00 |
| 98 | BANDUNG | PADANG | 6.129.000,00 | 3.508.000,00 |
| 99 | BANDUNG | PALEMBANG | 4.385.000,00 | 2.631.000,00 |
| 100 | BANDUNG | PANGKAL PINANG | 4.599.000,00 | 2.738.000,00 |
| 101 | BANDUNG | PEKANBARU | 6.525.000,00 | 3.701.000,00 |
| 102 | BANDUNG | SEMARANG | 3.027.000,00 | 1.957.000,00 |
| 103 | BANDUNG | SOLO | 3.647.000,00 | 2.268.000,00 |
| 104 | BANDUNG | SURABAYA | 4.824.000,00 | 2.856.000,00 |
| 105 | BANDUNG | TANJUNG PANDAN | 4.439.000,00 | 2.663.000,00 |
| 106 | BANJARMASIN | BANDA ACEH | 10.792.000,00 | 6.022.000,00 |
| 107 | BANJARMASIN | BATAM | 8.407.000,00 | 4.578.000,00 |
| 108 | BANJARMASIN | BIAK | 16.686.000,00 | 8.749.000,00 |
| 109 | BANJARMASIN | DENPASAR | 8.792.000,00 | 4.920.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|-------------|------------|---------------------------|---------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 110 | BANJARMASIN | JAYAPURA | 17.135.000,00 | 9.359.000,00 |
| 111 | BANJARMASIN | YOGYAKARTA | 7.723.000,00 | 4.022.000,00 |
| 112 | BANJARMASIN | MEDAN | 10.546.000,00 | 5.412.000,00 |
| 113 | BANJARMASIN | PADANG | 9.006.000,00 | 4.642.000,00 |
| 114 | BANJARMASIN | PALEMBANG | 7.498.000,00 | 4.022.000,00 |
| 115 | BANJARMASIN | PEKANBARU | 9.049.000,00 | 4.696.000,00 |
| 116 | BANJARMASIN | SEMARANG | 7.498.000,00 | 3.958.000,00 |
| 117 | BANJARMASIN | SOLO | 7.498.000,00 | 4.097.000,00 |
| 118 | BANJARMASIN | SURABAYA | 8.942.000,00 | 4.385.000,00 |
| 119 | BANJARMASIN | TIMIKA | 16.472.000,00 | 8.717.000,00 |
| 120 | BATAM | BANDA ACEH | 10.439.000,00 | 5.936.000,00 |
| 121 | BATAM | DENPASAR | 8.450.000,00 | 4.824.000,00 |
| 122 | BATAM | JAYAPURA | 16.782.000,00 | 9.263.000,00 |
| 123 | BATAM | YOGYAKARTA | 7.370.000,00 | 3.936.000,00 |
| 124 | BATAM | MAKASSAR | 10.375.000,00 | 5.337.000,00 |
| 125 | BATAM | MANADO | 13.413.000,00 | 6.482.000,00 |
| 126 | BATAM | MEDAN | 10.193.000,00 | 5.316.000,00 |
| 127 | BATAM | PADANG | 8.653.000,00 | 4.546.000,00 |
| 128 | BATAM | PALEMBANG | 7.145.000,00 | 3.936.000,00 |
| 129 | BATAM | PEKANBARU | 8.707.000,00 | 4.599.000,00 |
| 130 | BATAM | PONTIANAK | 7.594.000,00 | 4.396.000,00 |
| 131 | BATAM | SEMARANG | 7.145.000,00 | 3.861.000,00 |
| 132 | BATAM | SOLO | 7.145.000,00 | 4.000.000,00 |
| 133 | BATAM | SURABAYA | 8.600.000,00 | 4.300.000,00 |
| 134 | BATAM | TIMIKA | 16.119.000,00 | 8.621.000,00 |
| 135 | BENGKULU | PALEMBANG | 2.899.000,00 | 1.893.000,00 |
| 136 | BIAK | BALIKPAPAN | 18.622.000,00 | 9.477.000,00 |
| 137 | BIAK | BANDA ACEH | 18.718.000,00 | 10.108.000,00 |
| 138 | BIAK | BATAM | 16.333.000,00 | 8.664.000,00 |
| 139 | BIAK | DENPASAR | 16.729.000,00 | 8.995.000,00 |
| 140 | BIAK | JAYAPURA | 3.615.000,00 | 2.321.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 141 | BIAK | YOGYAKARTA | 15.648.000,00 | 8.108.000,00 |
| 142 | BIAK | MANADO | 11.734.000,00 | 6.353.000,00 |
| 143 | BIAK | MEDAN | 18.472.000,00 | 9.498.000,00 |
| 144 | BIAK | PADANG | 16.932.000,00 | 8.728.000,00 |
| 145 | BIAK | PALEMBANG | 15.424.000,00 | 8.108.000,00 |
| 146 | BIAK | PEKANBARU | 16.985.000,00 | 8.781.000,00 |
| 147 | BIAK | PONTIANAK | 15.873.000,00 | 8.568.000,00 |
| 148 | BIAK | SURABAYA | 12.782.000,00 | 7.081.000,00 |
| 149 | BIAK | TIMIKA | 5.808.000,00 | 3.444.000,00 |
| 150 | DENPASAR | JAYAPURA | 11.680.000,00 | 6.845.000,00 |
| 151 | DENPASAR | KUPANG | 5.091.000,00 | 2.952.000,00 |
| 152 | DENPASAR | MAKASSAR | 4.182.000,00 | 2.631.000,00 |
| 153 | DENPASAR | MANADO | 7.851.000,00 | 4.278.000,00 |
| 154 | DENPASAR | MATARAM | 1.840.000,00 | 1.390.000,00 |
| 155 | DENPASAR | MEDAN | 10.589.000,00 | 5.658.000,00 |
| 156 | DENPASAR | PADANG | 9.049.000,00 | 4.888.000,00 |
| 157 | DENPASAR | PALANGKARAYA | 8.557.000,00 | 4.909.000,00 |
| 158 | DENPASAR | PALEMBANG | 7.541.000,00 | 4.278.000,00 |
| 159 | DENPASAR | PEKANBARU | 9.092.000,00 | 4.942.000,00 |
| 160 | DENPASAR | PONTIANAK | 7.990.000,00 | 4.738.000,00 |
| 161 | DENPASAR | TIMIKA | 10.140.000,00 | 6.129.000,00 |
| 162 | JAMBI | BALIKPAPAN | 7.733.000,00 | 4.407.000,00 |
| 163 | JAMBI | BANJARMASIN | 7.690.000,00 | 4.193.000,00 |
| 164 | JAMBI | DENPASAR | 7.733.000,00 | 4.439.000,00 |
| 165 | JAMBI | YOGYAKARTA | 6.653.000,00 | 3.551.000,00 |
| 166 | JAMBI | KUPANG | 11.434.000,00 | 6.075.000,00 |
| 167 | JAMBI | MAKASSAR | 9.659.000,00 | 4.952.000,00 |
| 168 | JAMBI | MALANG | 7.091.000,00 | 3.925.000,00 |
| 169 | JAMBI | MANADO | 12.707.000,00 | 6.097.000,00 |
| 170 | JAMBI | PALANGKARAYA | 7.444.000,00 | 4.193.000,00 |
| 171 | JAMBI | PONTIANAK | 6.878.000,00 | 4.011.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|------------|------------|---------------------------|---------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 172 | JAMBI | SEMARANG | 6.428.000,00 | 3.476.000,00 |
| 173 | JAMBI | SOLO | 6.428.000,00 | 3.615.000,00 |
| 174 | JAMBI | SURABAYA | 7.883.000,00 | 3.915.000,00 |
| 175 | JAYAPURA | YOGYAKARTA | 13.274.000,00 | 7.690.000,00 |
| 176 | JAYAPURA | MANADO | 22.109.000,00 | 11.263.000,00 |
| 177 | JAYAPURA | MEDAN | 18.932.000,00 | 10.097.000,00 |
| 178 | JAYAPURA | PADANG | 17.381.000,00 | 9.327.000,00 |
| 179 | JAYAPURA | PALEMBANG | 15.873.000,00 | 8.717.000,00 |
| 180 | JAYAPURA | PEKANBARU | 17.435.000,00 | 9.380.000,00 |
| 181 | JAYAPURA | PONTIANAK | 16.322.000,00 | 9.177.000,00 |
| 182 | JAYAPURA | TIMIKA | 3.615.000,00 | 2.289.000,00 |
| 183 | YOGYAKARTA | DENPASAR | 3.861.000,00 | 2.481.000,00 |
| 184 | YOGYAKARTA | MAKASSAR | 6.525.000,00 | 3.893.000,00 |
| 185 | YOGYAKARTA | MANADO | 10.536.000,00 | 5.722.000,00 |
| 186 | YOGYAKARTA | MEDAN | 9.519.000,00 | 4.770.000,00 |
| 187 | YOGYAKARTA | PADANG | 7.969.000,00 | 4.000.000,00 |
| 188 | YOGYAKARTA | PALEMBANG | 6.460.000,00 | 3.380.000,00 |
| 189 | YOGYAKARTA | PEKANBARU | 8.022.000,00 | 4.054.000,00 |
| 190 | YOGYAKARTA | PONTIANAK | 6.910.000,00 | 3.840.000,00 |
| 191 | YOGYAKARTA | TIMIKA | 11.894.000,00 | 7.038.000,00 |
| 192 | KENDARI | BANDA ACEH | 12.953.000,00 | 7.102.000,00 |
| 193 | KENDARI | BATAM | 10.568.000,00 | 5.658.000,00 |
| 194 | KENDARI | DENPASAR | 5.455.000,00 | 3.273.000,00 |
| 195 | KENDARI | YOGYAKARTA | 8.129.000,00 | 4.706.000,00 |
| 196 | KENDARI | PADANG | 11.167.000,00 | 5.722.000,00 |
| 197 | KENDARI | PALEMBANG | 9.659.000,00 | 5.102.000,00 |
| 198 | KENDARI | PEKANBARU | 11.220.000,00 | 5.776.000,00 |
| 199 | KENDARI | SEMARANG | 9.659.000,00 | 5.027.000,00 |
| 200 | KENDARI | SOLO | 9.659.000,00 | 5.166.000,00 |
| 201 | KENDARI | SURABAYA | 11.103.000,00 | 5.466.000,00 |
| 202 | KENDARI | TIMIKA | 18.633.000,00 | 9.798.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 203 | KUPANG | JAYAPURA | 14.386.000,00 | 8.108.000,00 |
| 204 | KUPANG | YOGYAKARTA | 7.348.000,00 | 4.182.000,00 |
| 205 | KUPANG | MAKASSAR | 7.637.000,00 | 4.311.000,00 |
| 206 | KUPANG | MANADO | 11.648.000,00 | 6.140.000,00 |
| 207 | KUPANG | SURABAYA | 6.749.000,00 | 3.722.000,00 |
| 208 | MAKASSAR | BIAK | 8.493.000,00 | 4.931.000,00 |
| 209 | MAKASSAR | JAYAPURA | 10.193.000,00 | 5.787.000,00 |
| 210 | MAKASSAR | KENDARI | 2.663.000,00 | 1.786.000,00 |
| 211 | MAKASSAR | MANADO | 5.327.000,00 | 2.909.000,00 |
| 212 | MAKASSAR | TIMIKA | 11.723.000,00 | 6.567.000,00 |
| 213 | MALANG | BALIKPAPAN | 10.108.000,00 | 5.134.000,00 |
| 214 | MALANG | BANDA ACEH | 10.204.000,00 | 5.765.000,00 |
| 215 | MALANG | BANJARMASIN | 8.161.000,00 | 4.407.000,00 |
| 216 | MALANG | BATAM | 7.819.000,00 | 4.311.000,00 |
| 217 | MALANG | BIAK | 16.087.000,00 | 8.482.000,00 |
| 218 | MALANG | JAYAPURA | 16.536.000,00 | 9.092.000,00 |
| 219 | MALANG | KENDARI | 10.322.000,00 | 5.487.000,00 |
| 220 | MALANG | MAKASSAR | 10.129.000,00 | 5.166.000,00 |
| 221 | MALANG | MANADO | 13.167.000,00 | 6.311.000,00 |
| 222 | MALANG | MEDAN | 9.958.000,00 | 5.145.000,00 |
| 223 | MALANG | PADANG | 8.418.000,00 | 4.385.000,00 |
| 224 | MALANG | PALANGKARAYA | 7.915.000,00 | 4.407.000,00 |
| 225 | MALANG | PALEMBANG | 6.899.000,00 | 3.765.000,00 |
| 226 | MALANG | PEKANBARU | 8.461.000,00 | 4.439.000,00 |
| 227 | MALANG | TIMIKA | 15.873.000,00 | 8.461.000,00 |
| 228 | MANADO | MEDAN | 15.552.000,00 | 7.316.000,00 |
| 229 | MANADO | PADANG | 14.012.000,00 | 6.546.000,00 |
| 230 | MANADO | PALEMBANG | 12.504.000,00 | 5.926.000,00 |
| 231 | MANADO | PEKANBARU | 14.055.000,00 | 6.599.000,00 |
| 232 | MANADO | PONTIANAK | 12.953.000,00 | 6.396.000,00 |
| 233 | MANADO | SEMARANG | 12.504.000,00 | 5.851.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|---------|-------------|---------------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 234 | MANADO | SOLO | 12.504.000,00 | 5.990.000,00 |
| 235 | MANADO | SURABAYA | 9.937.000,00 | 5.262.000,00 |
| 236 | MANADO | TIMIKA | 16.183.000,00 | 8.995.000,00 |
| 237 | MATARAM | BALIKPAPAN | 10.750.000,00 | 5.615.000,00 |
| 238 | MATARAM | BANDA ACEH | 10.846.000,00 | 6.246.000,00 |
| 239 | MATARAM | BANJARMASIN | 8.803.000,00 | 4.888.000,00 |
| 240 | MATARAM | BATAM | 8.461.000,00 | 4.803.000,00 |
| 241 | MATARAM | BIAK | 11.552.000,00 | 6.546.000,00 |
| 242 | MATARAM | JAYAPURA | 13.092.000,00 | 7.327.000,00 |
| 243 | MATARAM | YOGYAKARTA | 4.417.000,00 | 2.781.000,00 |
| 244 | MATARAM | MAKASSAR | 4.717.000,00 | 2.909.000,00 |
| 245 | MATARAM | MANADO | 8.717.000,00 | 4.738.000,00 |
| 246 | MATARAM | MEDAN | 10.600.000,00 | 5.637.000,00 |
| 247 | MATARAM | PADANG | 9.060.000,00 | 4.867.000,00 |
| 248 | MATARAM | PALEMBANG | 7.551.000,00 | 4.246.000,00 |
| 249 | MATARAM | PEKANBARU | 9.102.000,00 | 4.909.000,00 |
| 250 | MATARAM | PONTIANAK | 8.001.000,00 | 4.706.000,00 |
| 251 | MATARAM | SURABAYA | 3.829.000,00 | 2.321.000,00 |
| 252 | MEDAN | BANDA ACEH | 3.466.000,00 | 2.193.000,00 |
| 253 | MEDAN | MAKASSAR | 12.514.000,00 | 6.172.000,00 |
| 254 | MEDAN | PONTIANAK | 9.733.000,00 | 5.230.000,00 |
| 255 | MEDAN | SEMARANG | 9.284.000,00 | 4.696.000,00 |
| 256 | MEDAN | SOLO | 9.284.000,00 | 4.835.000,00 |
| 257 | MEDAN | SURABAYA | 10.739.000,00 | 5.134.000,00 |
| 258 | MEDAN | TIMIKA | 18.258.000,00 | 9.455.000,00 |
| 259 | PADANG | MAKASSAR | 10.974.000,00 | 5.402.000,00 |
| 260 | PADANG | PONTIANAK | 8.193.000,00 | 4.460.000,00 |
| 261 | PADANG | SEMARANG | 7.744.000,00 | 3.925.000,00 |
| 262 | PADANG | SOLO | 7.744.000,00 | 4.065.000,00 |
| 263 | PADANG | SURABAYA | 9.199.000,00 | 4.364.000,00 |
| 264 | PADANG | TIMIKA | 16.718.000,00 | 8.685.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|----------------|-------------|---------------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 265 | PALANGKARAYA | BANDA ACEH | 10.546.000,00 | 6.022.000,00 |
| 266 | PALANGKARAYA | BATAM | 8.161.000,00 | 4.578.000,00 |
| 267 | PALANGKARAYA | YOGYAKARTA | 7.477.000,00 | 4.022.000,00 |
| 268 | PALANGKARAYA | MATARAM | 8.557.000,00 | 4.888.000,00 |
| 269 | PALANGKARAYA | MEDAN | 10.300.000,00 | 5.412.000,00 |
| 270 | PALANGKARAYA | PADANG | 8.760.000,00 | 4.642.000,00 |
| 271 | PALANGKARAYA | PALEMBANG | 7.252.000,00 | 4.022.000,00 |
| 272 | PALANGKARAYA | PEKANBARU | 8.803.000,00 | 4.696.000,00 |
| 273 | PALANGKARAYA | SEMARANG | 7.252.000,00 | 3.947.000,00 |
| 274 | PALANGKARAYA | SOLO | 7.252.000,00 | 4.086.000,00 |
| 275 | PALANGKARAYA | SURABAYA | 8.696.000,00 | 4.385.000,00 |
| 276 | PALEMBANG | BALIKPAPAN | 9.894.000,00 | 5.220.000,00 |
| 277 | PALEMBANG | MAKASSAR | 9.466.000,00 | 4.781.000,00 |
| 278 | PALEMBANG | PONTIANAK | 6.685.000,00 | 3.840.000,00 |
| 279 | PALEMBANG | SEMARANG | 6.236.000,00 | 3.305.000,00 |
| 280 | PALEMBANG | SOLO | 6.236.000,00 | 3.444.000,00 |
| 281 | PALEMBANG | SURABAYA | 7.690.000,00 | 3.744.000,00 |
| 282 | PALEMBANG | TIMIKA | 15.210.000,00 | 8.076.000,00 |
| 283 | PALU | MAKASSAR | 4.268.000,00 | 2.578.000,00 |
| 284 | PALU | POSO | 1.957.000,00 | 1.423.000,00 |
| 285 | PALU | SORONG | 6.878.000,00 | 3.883.000,00 |
| 286 | PALU | SURABAYA | 6.878.000,00 | 3.883.000,00 |
| 287 | PALU | TOLI-TOLI | 2.941.000,00 | 1.915.000,00 |
| 288 | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN | 9.038.000,00 | 4.631.000,00 |
| 289 | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN | 7.091.000,00 | 3.915.000,00 |
| 290 | PANGKAL PINANG | BATAM | 6.739.000,00 | 3.818.000,00 |
| 291 | PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA | 6.065.000,00 | 3.262.000,00 |
| 292 | PANGKAL PINANG | MAKASSAR | 9.060.000,00 | 4.663.000,00 |
| 293 | PANGKAL PINANG | MANADO | 12.097.000,00 | 5.808.000,00 |
| 294 | PANGKAL PINANG | MEDAN | 8.888.000,00 | 4.653.000,00 |
| 295 | PANGKAL PINANG | PADANG | 7.337.000,00 | 3.883.000,00 |

| NO. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET (Rp) | |
|-----|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 296 | PANGKAL PINANG | PALEMBANG | 5.829.000,00 | 3.262.000,00 |
| 297 | PANG KAL PINANG | PEKANBARU | 7.391.000,00 | 3.936.000,00 |
| 298 | PANGKAL PINANG | PONTIANAK | 6.279.000,00 | 3.733.000,00 |
| 299 | PANGKAL PINANG | SEMARANG | 5.829.000,00 | 3.187.000,00 |
| 300 | PANGKAL PINANG | SOLO | 5.829.000,00 | 3.326.000,00 |
| 301 | PANGKAL PINANG | SURABAYA | 7.284.000,00 | 3.626.000,00 |
| 302 | PEKANBARU | PONTIANAK | 8.247.000,00 | 4.514.000,00 |
| 303 | PEKANBARU | SEMARANG | 7.797.000,00 | 3.979.000,00 |
| 304 | PEKANBARU | SOLO | 7.797.000,00 | 4.118.000,00 |
| 305 | PEKANBARU | SURABAYA | 9.241.000,00 | 4.407.000,00 |
| 306 | PEKANBARU | TIMIKA | 16.771.000,00 | 8.739.000,00 |
| 307 | PONTIANAK | MAKASSAR | 9.915.000,00 | 5.241.000,00 |
| 308 | PONTIANAK | SEMARANG | 6.685.000,00 | 3.765.000,00 |
| 309 | PONTIANAK | SOLO | 6.685.000,00 | 3.904.000,00 |
| 310 | PONTIANAK | SURABAYA | 8.140.000,00 | 4.204.000,00 |
| 311 | PONTIANAK | TIMIKA | 15.659.000,00 | 8.535.000,00 |
| 312 | SEMARANG | MAKASSAR | 9.466.000,00 | 4.706.000,00 |
| 313 | SOLO | MAKASSAR | 9.466.000,00 | 4.845.000,00 |
| 314 | SURABAYA | DENPASAR | 3.198.000,00 | 1.979.000,00 |
| 315 | SURABAYA | JAYAPURA | 12.675.000,00 | 7.231.000,00 |
| 316 | SURABAYA | MAKASSAR | 5.936.000,00 | 3.433.000,00 |
| 317 | SURABAYA | TIMIKA | 11.295.000,00 | 6.589.000,00 |
| 318 | JEMBER | SURABAYA | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 |
| 319 | JEMBER | DENPASAR | - | 3.330.000,00 |
| 320 | JEMBER | JAKARTA | - | 6.216.000,00 |

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan ; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/ tempat kedudukan asal lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara at cost. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.2

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|------------------|------------|----------------|
| 1 | ACEH | Orang/Kali | Rp. 127.000,00 |
| 2 | SUMATERA UTARA | Orang/Kali | Rp. 308.000,00 |
| 3 | RIAU | Orang/Kali | Rp. 101.000,00 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | Orang/Kali | Rp. 165.000,00 |
| 5 | JAMBI | Orang/Kali | Rp. 147.000,00 |
| 6 | SUMATERA BARAT | Orang/Kali | Rp. 190.000,00 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | Orang/Kali | Rp. 179.000,00 |
| 8 | LAMPUNG | Orang/Kali | Rp. 168.000,00 |
| 9 | BENGKULU | Orang/Kali | Rp. 109.000,00 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | Orang/Kali | Rp. 97.000,00 |
| 11 | BANTEN | Orang/Kali | Rp. 536.000,00 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|---------------------|------------|----------------|
| 12 | JAWA BARAT | Orang/Kali | Rp. 200.000,00 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA | Orang/Kali | Rp. 256.000,00 |
| 14 | JAWA TENGAH | Orang/Kali | Rp. 108.000,00 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | Orang/Kali | Rp. 267.000,00 |
| 16 | JAWA TIMUR | Orang/Kali | Rp. 233.000,00 |
| 17 | BALI | Orang/Kali | Rp. 227.000,00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | Rp. 231.000,00 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | Rp. 116.000,00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | Orang/Kali | Rp. 171.000,00 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | Orang/Kali | Rp. 134.000,00 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | Orang/Kali | Rp. 180.000,00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | Orang/Kali | Rp. 533.000,00 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | Orang/Kali | Rp. 218.000,00 |
| 25 | SULAWESI UTARA | Orang/Kali | Rp. 138.000,00 |
| 26 | GORONTALO | Orang/Kali | Rp. 265.000,00 |
| 27 | SULAWESI BARAT | Orang/Kali | Rp. 313.000,00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | Orang/Kali | Rp. 187.000,00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | Orang/Kali | Rp. 165.000,00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | Orang/Kali | Rp. 171.000,00 |
| 31 | MALUKU | Orang/Kali | Rp. 288.000,00 |
| 32 | MALUKU UTARA | Orang/Kali | Rp. 215.000,00 |
| 33 | PAPUA | Orang/Kali | Rp. 513.000,00 |
| 34 | PAPUA BARAT | Orang/Kali | Rp. 236.000,00 |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA | Orang/Kali | Rp. 236.000,00 |
| 36 | PAPUA TENGAH | Orang/Kali | Rp. 513.000,00 |
| 37 | PAPUA SELATAN | Orang/Kali | Rp. 513.000,00 |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | Orang/Kali | Rp. 513.000,00 |

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagaiberikut:

a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
3. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara atcost.

b. Kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara atcost;
2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara atcost.

b. Kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*
2. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten / kota dalam provinsi yang sama (one way) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (*biaya riil*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|------------------|------------------------|------------|--------------|
| | ACEH | | | |
| 1 | Banda Aceh | Kab. Aceh Barat | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 2 | Banda Aceh | Kab. Aceh Barat Daya | Orang/Kali | 298.000,00 |
| 3 | Banda Aceh | Kab. Aceh Besar | Orang/Kali | 183.000,00 |
| 4 | Banda Aceh | Kab Aceh Jaya | Orang/Kali | 238.000,00 |
| 5 | Banda Aceh | Kab. Aceh Selatan | Orang/Kali | 325.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 6 | Banda Aceh | Kab. Aceh Singkil | Orang/Kali | 420.000,00 |
| 7 | Banda Aceh | Kab. Aceh Tamiang | Orang/Kali | 315.000,00 |
| 8 | Banda Aceh | Kab. Aceh Tengah | Orang/Kali | 293.000,00 |
| 9 | Banda Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Orang/Kali | 460.000,00 |
| 10 | Banda Aceh | Kab. Aceh Timur | Orang/Kali | 289.000,00 |
| 11 | Banda Aceh | Kab. Aceh Utara | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 12 | Banda Aceh | Kab. Bener Meriah | Orang/Kali | 278.000,00 |
| 13 | Banda Aceh | Kab. Bireuen | Orang/Kali | 220.000,00 |
| 14 | Banda Aceh | Kab. Gayo Lues | Orang/Kali | 370.000,00 |
| 15 | Banda Aceh | Kab. Nagan Raya | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 16 | Banda Aceh | Kab. Pidie | Orang/Kali | 190.000,00 |
| 17 | Banda Aceh | Kab. Pidie Jaya | Orang/Kali | 205.000,00 |
| 18 | Banda Aceh | Kota Langsa | Orang/Kali | 301.000,00 |
| 19 | Banda Aceh | Kota Lhokseumawe | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 20 | Banda Aceh | Kota Subulussalam | Orang/Kali | 400.000,00 |
| | SUMATERA UTARA | | | |
| 21 | Medan | Kab. Asahan | Orang/Kali | 259.000,00 |
| 22 | Medan | Kab. Batubara | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 23 | Medan | Kab. Dairi | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 24 | Medan | Kab. Deli Serdang | Orang/Kali | 186.000,00 |
| 25 | Medan | Kab. Humbang Hasundutan | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 26 | Medan | Kab. Karo | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 27 | Medan | Kab. Labuhan Batu | Orang/Kali | 287.000,00 |
| 28 | Medan | Kab. Labuhan Batu Selatan | Orang/Kali | 360.000,00 |
| 29 | Medan | Kab. Labuhan Batu Utara | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 30 | Medan | Kab. Langkat | Orang/Kali | 186.000,00 |
| 31 | Medan | Kab. Mandailing Natal | Orang/Kali | 420.000,00 |
| 32 | Medari | Kab. Padang Lawas | Orang/Kali | 420.000,00 |
| 33 | Medari | Kab. Padang Lawas Utara | Orang/Kali | 420.000,00 |
| 34 | Medan | Kab. Pakpak Bharat | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 35 | Medan | Kab. Samosir | Orang/Kali | 330.000,00 |
| 36 | Medan | Kab. Serdang Bedagai | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 37 | Medan | Kab. Simalungun | Orang/Kali | 264.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 38 | Medan | Kab. Tapanuli Selatan | Orang/Kali | 328.000,00 |
| 39 | Medan | Kab. Tapanuli Tengah | Orang/Kali | 345.000,00 |
| 40 | Medan | Kab. Tapanuli Utara | Orang/Kali | 330.000,00 |
| 41 | Medan | Kab. Toba | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 42 | Medan | Kota Binjai | Orang/Kali | 180.000,00 |
| 43 | Medan | Kota Pematang Siantar | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 44 | Medan | Kota Sibolga | Orang/Kali | 345.000,00 |
| 45 | Medan | Kota Tanjung Balai | Orang/Kali | 285.000,00 |
| 46 | Medan | Kota Tebing Tinggi | Orang/Kali | 203.000,00 |
| | RIAU | | | |
| 47 | Pekanbaru | Kab. Indragiri Hilir | Orang/Kali | 380.000,00 |
| 48 | Pekanbaru | Kab. Indragiri Hulu | Orang/Kali | 315.000,00 |
| 49 | Pekanbaru | Kab. Kampar | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 50 | Pekanbaru | Kab. Kuantan Singingi | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 51 | Pekanbaru | Kab. Pelalawan | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 52 | Pekanbaru | Kab. Rokan Hilir | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 53 | Pekanbaru | Kab. Rokan Hulu | Orang/Kali | 322.000,00 |
| 54 | Pekanbaru | Kab. Siak | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 55 | Pekanbaru | Kota Dumai | Orang/Kali | 400.000,00 |
| | KEPULAUAN RIAU | | | |
| 56 | Tanjung Pinang | Kab. Bintan | Orang/Kali | 185.000,00 |
| | JAMBI | | | |
| 57 | Jambi | Kab. Batanghari | Orang/Kali | 175.000,00 |
| 58 | Jambi | Kab. Btingo | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 59 | Jambi | Kab. Kerinci | Orang/Kali | 325.000,00 |
| 60 | Jambi | Kab. Merangin | Orang/Kali | 260.000,00 |
| 61 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Orang/Kali | 170.000,00 |
| 62 | Jambi | Kab. Sarolangun | Orang/Kali | 241.000,00 |
| 63 | Jambi | Kab. Tanjung Jabung Barat | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 64 | Jambi | Kab. Tanjung Jabung Timur | Orang/Kali | 190.000,00 |
| 65 | Jambi | Kab. Tebo | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 66 | Jambi | Kota Sungai Penuh | Orang/Kali | 308.000,00 |
| | SUMATERA BARAT | | | |
| 67 | Padang | Kab. Agam | Orang/Kali | 225.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 68 | Padang | Kab. Dharmasraya | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 69 | Padang | Kab. Lima Puluh Kota | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 70 | Padang | Kab. Padang Pariaman | Orang/Kali | 205.000,00 |
| 71 | Padang | Kab. Pasaman | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 72 | Padang | Kab. Pasaman Barat | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 73 | Padang | Kab. Pesisir Selatan | Orang/Kali | 205.000,00 |
| 74 | Padang | Kab. Sijunjung | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 75 | Padang | Kab. Solok | Orang/Kali | 210.000,00 |
| 76 | Padang | Kab. Solok Selatan | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 77 | Padang | Kab. Tanah Datar | Orang/Kali | 220.000,00 |
| 78 | Padang | Kota Bukit Tinggi | Orang/Kali | 215.000,00 |
| 79 | Padang | Kota Padang Panjang | Orang/Kali | 210.000,00 |
| 80 | Padang | Kota Pariaman | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 81 | Padang | Kota Payakumbuh | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 82 | Padang | Kota Sawahlunto | Orang/Kali | 215.000,00 |
| 83 | Padang | Kota Solok | Orang/Kali | 210.000,00 |
| SUMATERA SELATAN | | | | |
| 84 | PaJembang | Kab Banyuasin | Orang/Kali | 203.000,00 |
| 85 | Palembang | Kab. Empat Lawang | Orang/Kali | 315.000,00 |
| 86 | Palembang | Kab. Lahat | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 87 | Palembang | Kab. Muara Enim | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 88 | Palembang | Kab. Musi Banyuasin | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 89 | Palembang | Kab. Musi Rawas | Orang/Kali | 320.000,00 |
| 90 | Palembang | Kab. Musi Rawas Utara | Orang/Kali | 325.000,00 |
| 91 | Palembang | Kab. Ogan Ilir | Orang/Kali | 205.000,00 |
| 92 | Palembang | Kab. Ogan Komering Ilir | Orang/Kali | 205.000,00 |
| 93 | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu | Orang/Kali | 248.000,00 |
| 94 | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 95 | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 96 | Palembang | Kab. Pali | Orang/Kali | 265.000,00 |
| 97 | Palembang | Kota Lubuk Linggau | Orang/Kali | 290.000,00 |
| 98 | Palembang | Kota Pagar Alam | Orang/Kali | 280.000,00 |
| 99 | Palembang | Kota Prabumulih | Orang/Kali | 205.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| | LAMPUNG | | | |
| 100 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Barat | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 101 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Selatan | Orang/Kali | 234.000,00 |
| 102 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Tengah | Orang/Kali | 246.000,00 |
| 103 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Timur | Orang/Kali | 246.000,00 |
| 104 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Utara | Orang/Kali | 252.000,00 |
| 105 | Bandar Lampung | Kab. Mesuji | Orang/Kali | 276.000,00 |
| 106 | Bandar Lampung | Kab. Pesawaran | Orang/Kali | 216.000,00 |
| 107 | Bandar Lampung | Kab. Pesisir Barat | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 108 | Bandar Lampung | Kab. Pringsewu | Orang/Kali | 222.000,00 |
| 109 | Bandar Lampung | Kab. Tanggamus | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 110 | Bandar Lampung | Kab. Tulang Bawang | Orang/Kali | 252.000,00 |
| 111 | Bandar Lampung | Kab. Tulang Bawang Barat | Orang/Kali | 267.000,00 |
| 112 | Bandar Lampung | Kab. Way Kanan | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 113 | Bandar Lampung | Kota Metro | Orang/Kali | 234.000,00 |
| | BENGKULU | | | |
| 114 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | Orang/Kali | 344.000,00 |
| 115 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | Orang/Kali | 232.000,00 |
| 116 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | Orang/Kali | 313.000,00 |
| 117 | Bengkulu | Kab. Kaur | Orang/Kali | 385.000,00 |
| 118 | Bengkulu | Kab. Kepahiang | Orang/Kali | 298.000,00 |
| 119 | Bengkulu | Kab. Lebong | Orang/Kali | 375.000,00 |
| 120 | Bengkulu | Kab. Mukomuko | Orang/Kali | 423.000,00 |
| 121 | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | Orang/Kali | 313.000,00 |
| 122 | Bengkulu | Kab. Seluma | Orang/Kali | 282.000,00 |
| | BANGKA BELITUNG | | | |
| 123 | Pangkalpinang | Kab. Bangka | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 124 | Pangkalpinang | Kab. Bangka Barat | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 125 | Pangkalpinang | Kab. Bangka Selatan | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 126 | Pangkalpinang | Kab. Bangka Tengah | Orang/Kali | 250.000,00 |
| | BANTEN | | | |
| 127 | Serang | Kab. Lebak | Orang/Kali | 208.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-------------------|------------------------|------------|--------------|
| 128 | Serang | Kab. Pandeglang | Orang/Kali | 138.000,00 |
| 129 | Serang | Kab. Serang | Orang/Kali | 160.000,00 |
| 130 | Serang | Kab. Tangerang | Orang/Kali | 254.000,00 |
| 131 | Serang | Kota Cilegon | Orang/Kali | 160.000,00 |
| 132 | Serang | Kota Tangerang | Orang/Kali | 313.000,00 |
| 133 | Serang | Kota Tangerang Selatan | Orang/Kali | 347.000,00 |
| | JAWA BARAT | | | |
| 134 | Bandung | Kab. Bandung | Orang/Kali | 183.000,00 |
| 135 | Bandung | Kab. Bandung Barat | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 136 | Bandung | Kab. Bekasi | Orang/Kali | 265.000,00 |
| 137 | Bandung | Kab. Bogor | Orang/Kali | 185.000,00 |
| 138 | Bandung | Kab. Ciamis | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 139 | Bandung | Kab. Cianjur | Orang/Kali | 215.000,00 |
| 140 | Bandung | Kab. Cirebon | Orang/Kali | 280.000,00 |
| 141 | Bandung | Kab. Garut | Orang/Kali | 243.000,00 |
| 142 | Bandung | Kab. Indramayu | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 143 | Bandung | Kab. Karawang | Orang/Kali | 248.000,00 |
| 144 | Bandung | Kab. Kuningan | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 145 | Bandung | Kab. Majalengka | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 146 | Bandung | Kab. Pangadaran | Orang/Kali | 283.000,00 |
| 147 | Bandung | Kab. Purwakarta | Orang/Kali | 218.000,00 |
| 148 | Bandung | Kab. Subang | Orang/Kali | 208.000,00 |
| 149 | Bandung | Kab. Sukabumi | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 151 | Bandung | Kab. Tasikmalaya | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 152 | Bandung | Kota Banjar | Orang/Kali | 283.000,00 |
| 153 | Bandung | Kota Bekasi | Orang/Kali | 265.000,00 |
| 154 | Bandung | Kota Bogor | Orang/Kali | 285.000,00 |
| 155 | Bandung | Kota Cimahi | Orang/Kali | 168.000,00 |
| 156 | Bandung | Kota Cirebon | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 157 | Bandung | Kota Depok | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 158 | Bandung | Kota Sukabumi | Orang/Kali | 226.000,00 |
| 159 | Bandung | Kota Tasikmalaya | Orang/Kali | 245.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--------------------|------------------------|------------|--------------|
| | JAWA TENGAH | | | |
| 160 | Semarang | Kab. Banjarnegara | Orang/Kali | 260.000,00 |
| 161 | Semarang | Kab. Banyumas | Orang/Kali | 257.000,00 |
| 162 | Semarang | Kab. Batang | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 163 | Semarang | Kab. Blora | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 164 | Semarang | Kab. Boyolali | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 165 | Semarang | Kab. Brebes | Orang/Kali | 263.000,00 |
| 166 | Semarang | Kab. Cilacap | Orang/Kali | 280.000,00 |
| 167 | Semarang | Kab. Demak | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 168 | Semarang | Kab. Grobogan | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 169 | Semarang | Kab. Jepara | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 170 | Semarang | Kab. Karanganyar | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 171 | Semarang | Kab. Kebumen | Orang/Kali | 260.000,00 |
| 172 | Semarang | Kab. Kendal | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 173 | Semarang | Kab. Klaten | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 174 | Semarang | Kab. Kudus | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 175 | Semarang | Kab. Magelang | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 176 | Semarang | Kab. Pati | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 177 | Semarang | Kab. Pekalongan | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 178 | Semarang | Kab. Pemalang | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 179 | Semarang | Kab. Purbalingga | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 180 | Semarang | Kab. Purworejo | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 181 | Semarang | Kab. Rembang | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 182 | Semarang | Kab. Semarang | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 183 | Semarang | Kab. Sragen | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 184 | Semarang | Kab. Sukoharjo | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 185 | Semarang | Kab. Tegal | Orang/Kali | 260.000,00 |
| 186 | Semarang | Kab. Temanggung | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 187 | Semarang | Kab. Wonogiri | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 188 | Semarang | Kab. Wonosobo | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 189 | Semarang | Kota Magelang | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 190 | Semarang | Kota Pekalongan | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 191 | Semarang | Kota Salatiga | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 192 | Semarang | Kota Surakarta | Orang/Kali | 245.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 193 | Semarang | Kota Tegal | Orang/Kali | 260.000,00 |
| | D.I. YOGYAKARTA | | | |
| 194 | Yogyakarta | Kab. Bantul | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 195 | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 196 | Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 197 | Yogyakarta | Kab. Sleman | Orang/Kali | 200.000,00 |
| | JAWA TIMUR | | | |
| 198 | Surabaya | Kab. Bangkalan | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 199 | Surabaya | Kab. Banyuwangi | Orang/Kali | 285.000,00 |
| 200 | Surabaya | Kab. Blitar | Orang/Kali | 255.000,00 |
| 201 | Surabaya | Kab. Bojonegoro | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 202 | Surabaya | Kab. Bondowoso | Orang/Kali | 255.000,00 |
| 203 | Surabaya | Kab. Gresik | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 204 | Surabaya | Kab. Jember | Orang/Kali | 261.000,00 |
| 205 | Surabaya | Kab. Jombang | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 206 | Surabaya | Kab. Kediri | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 207 | Surabaya | Kab. Lamongan | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 208 | Surabaya | Kab. Lumajang | Orang/Kali | 261.000,00 |
| 209 | Surabaya | Kab. Madiun | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 210 | Surabaya | Kab. Magetan | Orang/Kali | 253.000,00 |
| 211 | Surabaya | Kab. Malang | Orang/Kali | 228.000,00 |
| 212 | Surabaya | Kab. Mojokerto | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 213 | Surabaya | Kab. Nganjuk | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 214 | Surabaya | Kab. Ngawi | Orang/Kali | 253.000,00 |
| 215 | Surabaya | Kab. Pacitan | Orang/Kali | 285.000,00 |
| 216 | Surabaya | Kab. Pamekasan | Orang/Kali | 243.000,00 |
| 217 | Surabaya | Kab. Pasuruan | Orang/Kali | 228.000,00 |
| 218 | Surabaya | Kab. Ponorogo | Orang/Kali | 255.000,00 |
| 219 | Surabaya | Kab. Probolinggo | Orang/Kali | 228.000,00 |
| 220 | Surabaya | Kab. Sampang | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 221 | Surabaya | Kab. Sidoarjo | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 222 | Surabaya | Kab. Situbondo | Orang/Kali | 255.000,00 |
| 223 | Surabaya | Kab. Sumenep | Orang/Kali | 255.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|----------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| 224 | Surabaya | Kab. Trenggalek | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 225 | Surabaya | Kab. Tuban | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 226 | Surabaya | Kab. Tulungagung | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 227 | Surabaya | Kota Batu | Orang/Kali | 242.000,00 |
| 228 | Surabaya | Kota Blitar | Orang/Kali | 255.000,00 |
| 229 | Surabaya | Kota Bojonegoro | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 230 | Surabaya | Kota Kediri | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 231 | Surabaya | Kota Madiun | Orang/Kali | 245.000,00 |
| 232 | Surabaya | Kota Malang | Orang/Kali | 228.000,00 |
| 233 | Surabaya | Kota Mojokerto | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 234 | Surabaya | Kota Probolinggo | Orang/Kali | 228.000,00 |
| | BALI | | | |
| 235 | Denpasar | Kab. Badung | Orang/Kali | 188.000,00 |
| 236 | Denpasar | Kab. Bangli | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 237 | Denpasar | Kab. Buleleng | Orang/Kali | 265.000,00 |
| 238 | Denpasar | Kab. Gianyar | Orang/Kali | 225.000,00 |
| 239 | Denpasar | Kab. Jembrana | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 240 | Denpasar | Kab. Karangasem | Orang/Kali | 263.000,00 |
| 241 | Denpasar | Kab. Tabanan | Orang/Kali | 225.000,00 |
| | NUSA TENGGARA BARAT | | | |
| 242 | Mataram | Kab Lombok Barat | Orang/Kali | 325.000,00 |
| 243 | Mataram | Kab. Lombok Tengah | Orang/Kali | 450.000,00 |
| 244 | Mataram | Kab. Lombok Timur | Orang/Kali | 350.000,00 |
| | NUSA TENGGARA TIMUR | | | |
| 245 | Kupang | Kab. Belu | Orang/Kali | 325.000,00 |
| 246 | Kupang | Kab Kupang | Orang/Kali | 175.000,00 |
| 247 | Kupang | Kab Timor Tengah Selatan | Orang/Kali | 218.000,00 |
| 248 | Kupang | Kab Timor Tengah Utara | Orang/Kali | 275.000,00 |
| | KALIMANTAN BARAT | | | |
| 249 | Pontianak | Kab. Bengkayang | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 250 | Pontianak | Kab. Kapuas Hulu | Orang/Kali | 550.000,00 |
| 251 | Pontianak | Kab. Kayong Utara | Orang/Kali | 550.000,00 |
| 252 | Pontianak | Kab. Ketapang | Orang/Kali | 550.000,00 |
| 253 | Pontianak | Kab. Kubu Raya | Orang/Kali | 185.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|
| 254 | Pontianak | Kab. Landak | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 255 | Pontianak | Kab. Melawi | Orang/Kali | 430.000,00 |
| 256 | Pontianak | Kab. Mempawah | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 257 | Pontianak | Kab. Sambas | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 258 | Pontianak | Kab. Sanggau | Orang/Kali | 303.000,00 |
| 259 | Pontianak | Kab. Sekadau | Orang/Kali | 343.000,00 |
| 260 | Pontianak | Kab. Sintang | Orang/Kali | 392.000,00 |
| 261 | Pontianak | Kota Singkawang | Orang/Kali | 257.000,00 |
| KALIMANTAN TENGAH | | | | |
| 262 | Palangkaraya | Kab Barito Selatan | Orang/Kali | 290.000,00 |
| 263 | Palangkaraya | Kab Barito Timur | Orang/Kali | 333.000,00 |
| 264 | Palangkaraya | Kab Barito Utara | Orang/Kali | 425.000,00 |
| 265 | PalangRaraya | Kab Gunung Mas | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 266 | Palangkaraya | Kab. Kapuas | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 267 | Palangkaraya | Kab. Katingan | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 268 | Palangkaraya | Kab. Kotawaringin Barat | Orang/Kali | 425.000,00 |
| 269 | Palangkaraya | Kab. Kotawaringin Timur | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 270 | Palangkaraya | Kab. Lamandau | Orang/Kali | 525.000,00 |
| 271 | Palangkaraya | Kab. Murung Raya | Orang/Kali | 448.000,00 |
| 272 | Palangkaraya | Kab. Pulau Pisau | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 273 | Palangkaraya | Kab. Seruyan | Orang/Kali | 328.000,00 |
| 274 | Palangkaraya | Kab. Sukamara | Orang/Kali | 525.000,00 |
| KALIMANTAN SELATAN | | | | |
| 275 | Banjarmasin | Kab. Balangan | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 276 | Banjarmasin | Kab. Banjar | Orang/Kali | 170.000,00 |
| 277 | Banjarmasin | Kab. Barito Kuala | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 278 | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 279 | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Tengah | Orang/Kali | 212.000,00 |
| 280 | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Utara | Orang/Kali | 218.000,00 |
| 281 | Banjarmasin | Kab. Kota Baru | Orang/Kali | 290.000,00 |
| 282 | Banjarmasin | Kab. Tabalong | Orang/Kali | 234.000,00 |
| 283 | Banjarmasin | Kab. Tanah Bumbu | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 284 | Banjarmasin | Kab. Tanah Laut | Orang/Kali | 200.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 285 | Banjarmasin | Kab. Tapin | Orang/Kali | 189.000,00 |
| 286 | Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Orang/Kali | 225.000,00 |
| KALIMANTAN TIMUR | | | | |
| 287 | Samarinda | Kab. Kutai Barat | Orang/Kali | 1.500.000,00 |
| 288 | Samarinda | Kab. Kutai Kartanegara | Orang/Kali | 500.000,00 |
| 289 | Samarinda | Kab. Kutai Timur | Orang/Kali | 1.350.000,00 |
| 290 | Samarinda | Kab. Paser | Orang/Kali | 1.650.000,00 |
| 291 | Samarinda | Kab. Penajam Paser Utara | Orang/Kali | 650.000,00 |
| 292 | Samarinda | Kota Balikpapan | Orang/Kali | 550.000,00 |
| 293 | Samarinda | Kota Bontang | Orang/Kali | 600.000,00 |
| SULAWESI UTARA | | | | |
| 294 | Manado | Kab. Bolaang Mongondow | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 295 | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 296 | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 297 | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 298 | Manado | Kab. Minahasa | Orang/Kali | 180.000,00 |
| 299 | Manado | Kab. Minahasa Selatan | Orang/Kali | 180.000,00 |
| 300 | Manado | Kab. Minahasa Tenggara | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 301 | Manado | Kab. Minahasa Utara | Orang/Kali | 175.000,00 |
| 302 | Manado | Kota Bitung | Orang/Kali | 175.000,00 |
| 303 | Manado | Kota Kotamobagu | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 304 | Manado | Kota Tomohon | Orang/Kali | 170.000,00 |
| GORONTALO | | | | |
| 305 | Gorontalo | Kab. Boalemo | Orang/Kali | 400.000,00 |
| 306 | Gorontalo | Kab. Gorontalo | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 307 | Gorontalo | Kab. Gorontalo Utara | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 308 | Gorontalo | Kab. Pahuwato | Orang/Kali | 650.000,00 |
| SULAWESI BARAT | | | | |
| 309 | Mamuju | Kab. Maene | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 310 | Mamuju | Kab. Mamasa | Orang/Kali | 359.000,00 |
| 311 | Mamuju | Kab. Mamuju Tengah | Orang/Kali | 200.000,00 |
| 312 | Mamuju | Kab. Pasangkayu | Orang/Kali | 270.000,00 |
| 313 | Mamuju | Kab. Polewali Mandar | Orang/Kali | 260.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------|
| SULAWESI SELATAN | | | | |
| 314 | Makassar | Kab. Bantaeng | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 315 | Makassar | Kab. Barru | Orang/Kali | 210.000,00 |
| 316 | Makassar | Kab. Bone | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 317 | Makassar | Kab. Bulukumba | Orang/Kali | 240.000,00 |
| 318 | Makassar | Kab. Enrekang | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 319 | Makassar | Kab. Gowa | Orang/Kali | 175.000,00 |
| 320 | Makassar | Kab. Jeneponto | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 321 | Makassar | Kab. Luwu | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 322 | Makassar | Kab. Luwu Timur | Orang/Kali | 375.000,00 |
| 323 | Makassar | Kab. Luwu Utara | Orang/Kali | 365.000,00 |
| 324 | Makassar | Kab. Maros | Orang/Kali | 170.000,00 |
| 325 | Makassar | Kab. Pinrang | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 326 | Makassar | Kab. Sidenreng Rappang | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 327 | Makassar | Kab. Sinjai | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 328 | Makassar | Kab. Soppeng | Orang/Kali | 235.000,00 |
| 329 | Makassar | Kab. Takalar | Orang/Kali | 190.000,00 |
| 330 | Makassar | Kab. Tanatoraja | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 331 | Makassar | Kab. Toraja Utara | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 332 | Makassar | Kab. Wajo | Orang/Kali | 230.000,00 |
| 333 | Makassar | Kota Palopo | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 334 | Makassar | Kota Pare-Pare | Orang/Kali | 225.000,00 |
| SULAWESI TENGAH | | | | |
| 335 | Palu | Kab. Luwuk | Orang/Kali | 400.000,00 |
| 336 | Palu | Kab. Buol | Orang/Kali | 472.000,00 |
| 337 | Palu | Kab. Donggala | Orang/Kali | 130.000,00 |
| 338 | Palu | Kab. Morowali | Orang/Kali | 400.000,00 |
| 339 | Palu | Kab. Morowali Utara | Orang/Kali | 400.000,00 |
| 340 | Palu | Kab. Parigi Moutong | Orang/Kali | 250.000,00 |
| 341 | Palu | Kab. Poso | Orang/Kali | 280.000,00 |
| 342 | Palu | Kab. Sigi | Orang/Kali | 219.000,00 |
| 343 | Palu | Kab. Tojouna-Una | Orang/Kali | 350.000,00 |
| 344 | Palu | Kab. Toli-Toli | Orang/Kali | 412.000,00 |

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------|
| SULAWESI TENGGARA | | | | |
| 345 | Kendari | Kab. Bombana | Orang/Kali | 355.000,00 |
| 346 | Kendari | Kab. Kolaka | Orang/Kali | 370.000,00 |
| 347 | Kendari | Kab. Kolaka Timur | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 348 | Kendari | Kab. Kolaka Utara | Orang/Kali | 425.000,00 |
| 349 | Kendari | Kab. Konawe | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 350 | Kendari | Kab. Konawe Selatan | Orang/Kali | 305.000,00 |
| 351 | Kendari | Kab. Konawe Utara | Orang/Kali | 300.000,00 |
| MALUKU UTARA | | | | |
| 352 | Sofifi | Kab. Halmahera Barat | Orang/Kali | 850.000,00 |
| 353 | Sofifi | Kab. Halmahera Tengah | Orang/Kali | 1.000.000,00 |
| 354 | SoFtfi | Kab. Halmahera Timur | Orang/Kali | 1.250.000,00 |
| 355 | Sofifi | Kab. Halmahera Utara | Orang/Kali | 900.000,00 |
| PAPUA | | | | |
| 356 | Jayapura | Kab. Jayapura | Orang/Kali | 600.000,00 |
| 357 | Jayapura | Kab. Keerom | Orang/Kali | 900.000,00 |
| 358 | Jayapura | Kab. Sarmi | Orang/Kali | 2.700.000,00 |
| PAPUA BARAT | | | | |
| 359 | Manokwari | Kab Teluk Bintuni | Orang/Kali | 900.000,00 |
| 360 | Manokwari | Kab Manokwari Selatan | Orang/Kali | 750.000,00 |
| 361 | Manokwari | Kab. Pegunungan Arfak | Orang/Kali | 2.650.000,00 |

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA
SEKITAR (ONE WAY)

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN / KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|---------------------|----------------------------|------------|--------------|
| 1 | Jakarta | Kota Bekasi | Orang/Kali | 284.000,00 |
| 2 | Jakarta | Kab. Bekasi | Orang/Kali | 284.000,00 |
| 3 | Jakarta | Kab. Bogor | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 4 | Jakarta | Kota Bogor | Orang/Kali | 300.000,00 |
| 5 | Jakarta | Kota Depok | Orang/Kali | 275.000,00 |
| 6 | Jakarta | Kota Tangerang | Orang/Kali | 286.000,00 |
| 7 | Jakarta | Kota Tangerang Selatan | Orang/Kali | 286.000,00 |
| 8 | Jakarta | Kab. Tangerang | Orang/Kali | 310.000,00 |
| 9 | Jakarta | Kepulauan Seribu | Orang/Kali | 428.000,00 |

- 2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN JEMBER KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)
1. Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Jember ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (One Way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jember ke tempat tujuan di ke kabupaten/kota dalam satu provinsi yang sama dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 2. Biaya transportasi darat dari Kabupaten Jember ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (One Way atau sekali jalan) perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil) dengan melampirkan bukti struk pembiayaan riil yang meliputi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan, Tiket E-Toll, Tiket Bus, Travel, Kereta Api dan bukti pembayaran sewa kendaraan (bila perjalanan dinas dilakukan secara rombongan/group).

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN JEMBER KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

| NO | ASAL | TUJUAN | SATUAN | SATUAN BIAYA |
|----|--------|------------------|------------|--------------|
| 1 | Jember | Kota Surabaya | Orang/Kali | Rp 261.000 |
| 2 | Jember | Kota Batu | Orang/Kali | Rp 289.000 |
| 3 | Jember | Kota Probolinggo | Orang/Kali | Rp 133.000 |
| 4 | Jember | Kota Kediri | Orang/Kali | Rp 391.000 |
| 5 | Jember | Kota Madiun | Orang/Kali | Rp 434.000 |
| 6 | Jember | Kota Blitar | Orang/Kali | Rp 377.000 |
| 7 | Jember | Kota Malang | Orang/Kali | Rp 276.000 |
| 8 | Jember | Kota Mojokerto | Orang/Kali | Rp 301.000 |
| 9 | Jember | Kota Pasuruan | Orang/Kali | Rp 181.000 |
| 10 | Jember | Kab. Pacitan | Orang/Kali | Rp 593.000 |
| 11 | Jember | Kab. Sumenep | Orang/Kali | Rp 493.000 |
| 12 | Jember | Kab. Ponorogo | Orang/Kali | Rp 490.000 |
| 13 | Jember | Kab. Magetan | Orang/Kali | Rp 483.000 |
| 14 | Jember | Kab. Ngawi | Orang/Kali | Rp 478.000 |
| 15 | Jember | Kab. Trenggalek | Orang/Kali | Rp 470.000 |
| 16 | Jember | Kab. Madiun | Orang/Kali | Rp 434.000 |
| 17 | Jember | Kab. Tulungagung | Orang/Kali | Rp 431.000 |
| 18 | Jember | Kab. Pamekasan | Orang/Kali | Rp 422.000 |
| 19 | Jember | Kab. Bojonegoro | Orang/Kali | Rp 463.000 |
| 20 | Jember | Kab. Tuban | Orang/Kali | Rp 391.000 |
| 21 | Jember | Kab. Kediri | Orang/Kali | Rp 391.000 |
| 22 | Jember | Kab. Blitar | Orang/Kali | Rp 377.000 |
| 23 | Jember | Kab. Nganjuk | Orang/Kali | Rp 384.000 |
| 24 | Jember | Kab. Sampang | Orang/Kali | Rp 377.000 |
| 25 | Jember | Kab. Jombang | Orang/Kali | Rp 339.000 |
| 26 | Jember | Kab. Lamongan | Orang/Kali | Rp 319.000 |
| 27 | Jember | Kab. Bangkalan | Orang/Kali | Rp 315.000 |
| 28 | Jember | Kab. Malang | Orang/Kali | Rp 276.000 |
| 29 | Jember | Kab. Mojokerto | Orang/Kali | Rp 301.000 |
| 30 | Jember | Kab. Gresik | Orang/Kali | Rp 285.000 |
| 31 | Jember | Kab. Sidoarjo | Orang/Kali | Rp 237.000 |
| 32 | Jember | Kab. Pasuruan | Orang/Kali | Rp 181.000 |
| 33 | Jember | Kab. Probolinggo | Orang/Kali | Rp 133.000 |
| 34 | Jember | Kab. Banyuwangi | Orang/Kali | Rp 142.000 |
| 35 | Jember | Kab. Lumajang | Orang/Kali | Rp 88.000 |
| 36 | Jember | Kab. Situbondo | Orang/Kali | Rp 91.000 |
| 37 | Jember | Kab. Bondowoso | Orang/Kali | Rp 44.000 |

2.6. PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Surat Perintah Tugas (SPT)

1. Yang dapat melakukan perjalanan Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang, sedangkan bagi Pegawai non PNS maksimal disetarakan dengan golongan I
2. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu :
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati ;
 - 2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
 - 3) Bagi Pejabat Eselon II a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati ;
 - 4) Bagi Pejabat Eselon II b dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Badan/ Dinas ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - 5) Bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten yang membidangi.
 - 6) Bagi Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 - 7) Bagi Pejabat Eselon III pada Badan dan Dinas ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas yang bersangkutan.
 - 8) Bagi Pejabat Eselon IV / pegawai lainnya ditandatangani oleh Pejabat yang menjadi atasan langsungnya.

2. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati untuk SPPD ditanda tangani oleh Bupati atas nama atasan langsungnya karena merupakan Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan.

- 2) Penandatanganan SPPD pada lembar I dan lembar II sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Dinas/ Badan/ Sekretariat DPRD/ Satpol PP/ Inspektorat ditandatangani oleh KPA atau PA bagi OPD yang tidak memiliki KPA;
 - b. Bagi Pejabat Eselon III (Kepala Bagian Setda. Kab/ Camat) ditandatangani oleh KPA atau PA bagi OPD yang tidak memiliki KPA
 - 3) Lembar II (tempat tujuan) :
 - a. Pada OPD ditandatangani oleh yang berwenang pada tempat yang dikunjungi.;
 - b. Di luar OPD ditandatangani oleh penanggungjawab tempat yang dikunjungi.
 - 4) Penandatanganan Lembar ke I dan II Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
3. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
 4. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetorkan/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
6. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 7. Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
 8. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
 9. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ dan pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

- d. Daftar Pengeluaran Riil;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

10. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Biaya kegiatan rapat di dalam kantor berupa biaya konsumsi rapat yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada table 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

| NO | PROVINSI JATIM | SATUAN | MAKAN | KUDAPAN (SNACK) |
|----|--|------------|---------------|-----------------|
| 1 | RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA | Orang/Kali | Rp 110.000,00 | Rp 49.000,00 |
| 2 | RAPAT BIASA | Orang/Kali | Rp 49.000,00 | Rp 23.000,00 |

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah,dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri terinci sebagai berikut :

- 1) Gedung bertingkat = Rp. 196.000/m²/tahun
- 2) Gedung tidak bertingkat = Rp. 170.000/m²/tahun
- 3) Halaman gedung/bangunan kantor = Rp. 10.000,00/m²/tahun

4.2. SATUAN BIAYA BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

Satuan biaya pemeliharaan terinci dalam Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11. Sedangkan satuan biaya pengurusan STNKB terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|----------------------------|------------|------------------|
| 1. | KEPALA DAERAH / KETUA DPRD | Unit/Tahun | Rp 45.670.000,00 |
| 2. | ANGGOTA DPRD | Unit/Tahun | Rp 44.010.000,00 |
| 3. | PEJABAT ESELON I | Unit/Tahun | Rp 42.350.000,00 |
| 4. | PEJABAT ESELON II | Unit/Tahun | Rp 42.370.000,00 |

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

| NO | TIPE KENDARAAN | SATUAN | BIAYA PEMELIHARAAN |
|----|----------------|------------|--------------------|
| 1. | RODA EMPAT | Unit/Tahun | Rp 36.940.000,00 |
| 2. | DOUBLE GARDAN | Unit/Tahun | Rp 39.630.000,00 |
| 3. | RODA DUA | Unit/Tahun | Rp 4.970.000,00 |

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL RODA 6 DAN SPEED BOAT

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|------------|------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Roda 6 | Unit/Tahun | Rp. 37.110.000 |
| 2. | Speed boat | Unit/Tahun | Rp. 20.240.000 |

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
LISTRIK BERBASIS BATERAI

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|------------------------------|------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pejabat Eselon I | Unit/Tahun | Rp. 11.100.000 |
| 2. | Pejabat Eselon II | Unit/Tahun | Rp. 10.990.000 |
| 3. | Kendaraan Operasional Kantor | Unit/Tahun | Rp. 10.460.000 |
| 4. | Kendaraan Roda Dua | Unit/Tahun | Rp. 3.200.000 |

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA PENGURUSAN STNKB

| NO | JENIS KENDARAAN | 1 TAHUN | 5 TAHUN |
|----|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Jenis Sedan / Jeep (VIP) | Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.500.000,00 |
| 2 | Jenis Bus dan Truck | Rp. 3.000.000,00 | Rp. 3.500.000,00 |
| 3 | Jenis Sedan, Jeep, Station/Pickup | Rp. 1.500.000,00 | Rp. 2.000.000,00 |
| 4 | Sepeda Motor diatas 500cc | Rp. 1.500.000,00 | Rp. 1.800.000,00 |
| 5 | Sepeda Motor sampai dengan 500cc | Rp. 400.000,00 | Rp. 600.000,00 |

Untuk kendaraan tertentu dapat dianggarkan biaya Uji KIR (Rp 1.000.000) dan Perpanjangan STNK untuk Nomor Khusus per tahun (Rp 6.000.000) dan atau mengalami kenaikan maksimal 50% dari tahun sebelumnya.

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci sebagaimana Tabel 2.13.

TABEL 2.13
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Inventaris Kantor | Pegawai/Tahun | Rp 80.000,00 |
| 2 | Personal Computer/Notebook | Unit/Tahun | Rp 730.000,00 |
| 3 | Printer | Unit/Tahun | Rp 690.000,00 |
| 4 | AC Split | Unit/Tahun | Rp 610.000,00 |
| 5 | Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun | Rp 7.190.000,00 |
| 6 | Genset 75 KVA | Unit/Tahun | Rp 8.640.000,00 |
| 7 | Genset 100 KVA | Unit/Tahun | Rp 10.150.000,00 |
| 8 | Genset 125 KVA | Unit/Tahun | Rp 10.780.000,00 |
| 9 | Genset 150 KVA | Unit/Tahun | Rp 13.260.000,00 |
| 10 | Genset 175 KVA | Unit/Tahun | Rp 14.810.000,00 |
| 11 | Genset 200 KVA | Unit/Tahun | Rp 15.850.000,00 |
| 12 | Genset 250 KVA | Unit/Tahun | Rp 16.790.000,00 |
| 13 | Genset 275 KVA | Unit/Tahun | Rp 17.760.000,00 |
| 14 | Genset 300 KVA | Unit/Tahun | Rp 20.960.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|----------------|------------|------------------|
| 15 | Genset 350 KVA | Unit/Tahun | Rp 22.960.000,00 |
| 16 | Genset 430 KVA | Unit/Tahun | Rp 25.620.000,00 |
| 17 | Genset 500 KVA | Unit/Tahun | Rp 31.770.000,00 |



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- 1) Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- 2) Khusus Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/ lembaga.
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas luar negeri memperhatikan ketentuan :
 - a. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil Kunjungan Kerja atau studi banding dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 (Dalam US Dollar)

| NO | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|-----|------------------------|--------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | Bupati/ Wakil Bupati | DPRD/ Eselon II | Eselon III dan IV | Staf Gol I- IV/ Non PNS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | AMERIKA UTARA | | | | | |
| 1 | Amerika Serikat | OH | 659 | 563 | 505 | 447 |
| 2 | Kanada | OH | 552 | 467 | 416 | 365 |
| | AMERIKA SELATAN | | | | | |
| 3 | Argentina | OH | 534 | 402 | 351 | 349 |
| 4 | Venezuela | OH | 557 | 388 | 344 | 343 |
| 5 | Brazil | OH | 436 | 396 | 378 | 351 |
| 6 | Chili | OH | 434 | 370 | 332 | 294 |
| 7 | Kolombia | OH | 466 | 413 | 405 | 365 |
| 8 | Peru | OH | 459 | 352 | 320 | 280 |
| 9 | Suriname | OH | 460 | 375 | 312 | 288 |
| 10 | Ekuador | OH | 416 | 355 | 319 | 283 |
| | AMERIKA TENGAH | | | | | |
| 11 | Meksiko | OH | 553 | 468 | 417 | 366 |
| 12 | Kuba | OH | 453 | 385 | 345 | 305 |
| 13 | Panama | OH | 418 | 357 | 320 | 283 |
| | EROPA BARAT | | | | | |
| 14 | Austria | OH | 504 | 453 | 347 | 317 |
| 15 | Belgia | OH | 538 | 456 | 406 | 357 |
| 16 | Perancis | OH | 548 | 464 | 413 | 381 |
| 17 | Jerman | OH | 485 | 415 | 368 | 324 |
| 18 | Belanda | OH | 485 | 416 | 368 | 324 |
| 19 | Swiss | OH | 636 | 570 | 444 | 401 |
| | EROPA UTARA | | | | | |
| 20 | Denmark | OH | 569 | 491 | 428 | 375 |
| 21 | Finlandia | OH | 521 | 442 | 394 | 346 |
| 22 | Norwegia | OH | 621 | 559 | 389 | 386 |
| 23 | Swedia | OH | 615 | 519 | 461 | 403 |
| 24 | Inggris | OH | 792 | 774 | 583 | 582 |

| NO | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|-----|-----------------------|--------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | Bupati/ Wakil Bupati | DPRD/ Eselon II | Eselon III dan IV | Staf Gol I- IV/ Non PNS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | EROPA SELATAN | | | | | |
| 25 | Bosnia Herzegovina | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26 | Kroasia | OH | 555 | 506 | 406 | 405 |
| 27 | Spanyol | OH | 457 | 413 | 335 | 296 |
| 28 | Yunani | OH | 427 | 379 | 327 | 289 |
| 29 | Italia | OH | 702 | 637 | 446 | 427 |
| 30 | Portugal | OH | 462 | 405 | 333 | 302 |
| 31 | Serbia | OH | 417 | 375 | 326 | 288 |
| | EROPA TIMUR | | | | | |
| 32 | Bulgaria | OH | 406 | 367 | 320 | 284 |
| 33 | Ceko | OH | 618 | 526 | 447 | 367 |
| 34 | Hongaria | OH | 485 | 438 | 390 | 345 |
| 35 | Polandia | OH | 478 | 415 | 363 | 320 |
| 36 | Rumania | OH | 416 | 381 | 313 | 277 |
| 37 | Rusia | OH | 556 | 512 | 407 | 406 |
| 38 | Slovakia | OH | 437 | 394 | 341 | 303 |
| 39 | Ukraina | OH | 485 | 436 | 375 | 331 |
| | AFRIKA BARAT | | | | | |
| 40 | Nigeria | OH | 468 | 428 | 405 | 370 |
| 41 | Senegal | OH | 461 | 393 | 336 | 311 |
| 42 | Kamerun | OH | 468 | 428 | 405 | 370 |
| | AFRIKA TIMUR | | | | | |
| 43 | Ethiopia | OH | 420 | 374 | 330 | 285 |
| 44 | Kenya | OH | 457 | 418 | 344 | 308 |
| 45 | Madagaskar | OH | 543 | 366 | 330 | 295 |
| 46 | Tanzania | OH | 458 | 386 | 357 | 303 |
| 47 | Zimbabwe | OH | 430 | 400 | 330 | 316 |
| 48 | Mozambik | OH | 472 | 436 | 356 | 319 |
| | AFRIKA SELATAN | | | | | |
| 49 | Namibia | OH | 442 | 376 | 312 | 269 |
| 50 | Afrika Selatan | OH | 440 | 400 | 363 | 317 |
| | AFRIKA UTARA | | | | | |
| 51 | Aljazair | OH | 394 | 361 | 319 | 290 |
| 52 | Mesir | OH | 481 | 426 | 405 | 361 |
| 53 | Maroko | OH | 442 | 373 | 320 | 298 |
| 54 | Tunisia | OH | 413 | 320 | 283 | 252 |
| 55 | Sudan | OH | 443 | 408 | 358 | 280 |
| 56 | Libya | OH | 456 | 393 | 340 | 320 |

| NO | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|-----|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | Bupati/ Wakil Bupati | DPRD/ Eselon II | Eselon III dan IV | Staf Gol I- IV/ Non PNS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | ASIA BARAT | | | | | |
| 57 | Azerbaijan | OH | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 58 | Bahrain | OH | 483 | 455 | 330 | 257 |
| 59 | Irak | OH | 461 | 392 | 351 | 310 |
| 60 | Yordania | OH | 504 | 428 | 382 | 336 |
| 61 | Kuwait | OH | 581 | 491 | 437 | 383 |
| 62 | Libanon | OH | 457 | 389 | 348 | 307 |
| 63 | Qatar | OH | 506 | 448 | 349 | 290 |
| 64 | Suriah | OH | 358 | 301 | 272 | 243 |
| 65 | Turki | OH | 456 | 364 | 311 | 276 |
| 66 | Uni Emirat Arab | OH | 594 | 502 | 446 | 391 |
| 67 | Yaman | OH | 353 | 249 | 226 | 204 |
| 68 | Saudi Arabia | OH | 468 | 398 | 356 | 314 |
| 69 | Kesultanan Oman | OH | 516 | 437 | 390 | 343 |
| | ASIA TIMUR | | | | | |
| 70 | Republik Rakyat Tiongkok | OH | 411 | 351 | 315 | 279 |
| 71 | Hongkong | OH | 601 | 507 | 451 | 395 |
| 72 | Jepang | OH | 519 | 428 | 382 | 336 |
| 73 | Korea Selatan | OH | 515 | 467 | 425 | 421 |
| 74 | Korea Utara | OH | 494 | 321 | 300 | 278 |
| | ASIA SELATAN | | | | | |
| 75 | Afganistan | OH | 585 | 503 | 283 | 250 |
| 76 | Bangladesh | OH | 390 | 347 | 287 | 257 |
| 77 | India | OH | 422 | 329 | 327 | 325 |
| 78 | Pakistan | OH | 480 | 408 | 305 | 263 |
| 79 | Srilanka | OH | 457 | 362 | 337 | 280 |
| 80 | Iran | OH | 421 | 332 | 299 | 266 |
| | ASIA TENGAH | | | | | |
| 81 | Uzbekistan | OH | 458 | 395 | 317 | 282 |
| 82 | Kazakhstan | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | ASIA TENGGARA | | | | | |
| 83 | Filipina | OH | 450 | 380 | 287 | 265 |
| 84 | Singapura | OH | 615 | 519 | 461 | 403 |
| 85 | Malaysia | OH | 435 | 347 | 308 | 268 |
| 86 | Thailand | OH | 420 | 358 | 318 | 278 |
| 87 | Myanmar | OH | 382 | 283 | 273 | 245 |
| 88 | Laos | OH | 380 | 277 | 251 | 225 |
| 89 | Vietnam | OH | 407 | 343 | 297 | 253 |

| NO | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|-----|---------------------|--------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | Bupati/ Wakil Bupati | DPRD/ Eselon II | Eselon III dan IV | Staf Gol I- IV/ Non PNS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 90 | Brunei Darussalam | OH | 374 | 278 | 252 | 226 |
| 91 | Kamboja | OH | 347 | 282 | 277 | 250 |
| 92 | Timor Leste | OH | 392 | 354 | 236 | 212 |
| | ASIA PASIFIK | | | | | |
| 92 | Australia | OH | 636 | 585 | 424 | 393 |
| 93 | Selandia Baru | OH | 545 | 461 | 411 | 361 |
| 94 | Kaledonia Baru | OH | 445 | 400 | 368 | 280 |
| 95 | Papua Nugini | OH | 520 | 476 | 429 | 376 |
| 96 | Fiji | OH | 427 | 365 | 327 | 289 |

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional dan biaya penginapan.
2. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara Dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
3. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
4. Dalam hal golongan uang harian bagi pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan bersama, diatur sebagai berikut :
 - a. Masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) Tingkat di atasnya; atau
 - b. Dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana pada angka 3 tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) Tingkat di atasnya.

5. Dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, maka uang harian dapat dibayarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas Luar Negeri, sedangkan biaya penginapan dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran/ pengeluaran riil). Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PULANG PERGI
(Dalam US Dollar)

| NO | KOTA | BESARAN | | |
|----|------------------------|-----------|--------|---------|
| | | EKSEKUTIF | BISNIS | EKONOMI |
| | AMERIKA UTARA | | | |
| 1 | Chicago | 12.733 | 6.891 | 3.662 |
| 2 | Houston | 12.635 | 6.487 | 3.591 |
| 3 | Los Angeles | 11.411 | 5.925 | 3.242 |
| 4 | New York | 15.101 | 11.368 | 3.839 |
| 5 | Ottawa | 12.266 | 9.670 | 4.083 |
| 6 | San Fransisco | 13.438 | 7.138 | 2.987 |
| 7 | Toronto | 11.750 | 8.564 | 3.201 |
| 8 | Vancouver | 10.902 | 7.458 | 3.277 |
| 9 | Washington | 15.150 | 9.356 | 3.930 |
| | AMERIKA SELATAN | | | |
| 10 | Bogota | 18.399 | 9.426 | 7.713 |
| 11 | Brasilia | 16.393 | 11.518 | 5.970 |
| 12 | Boenos Aires | 23.000 | 15.300 | 10.400 |
| 13 | Caracas | 23.128 | 13.837 | 6.825 |
| 14 | Paramaribo | 15.018 | 9.494 | 7.353 |
| 15 | Santiago de Chile | 21.874 | 15.539 | 8.900 |
| 16 | Quito | 17.325 | 16.269 | 12.127 |
| 17 | Lima | 8.263 | 8.263 | 5.038 |

| NO | KOTA | BESARAN | | |
|----|-----------------------|-----------|--------|---------|
| | | EKSEKUTIF | BISNIS | EKONOMI |
| | AMERIKA TENGAH | | | |
| 18 | Meksiko | 11.822 | 8.265 | 3.966 |
| 19 | Havana | 14.702 | 11.223 | 7.335 |
| 20 | Panama | 15.532 | 9.306 | 6.195 |
| | EROPA BARAT | | | |
| 21 | Vienna | 10.520 | 4.177 | 3.357 |
| 22 | Brussel | 10.713 | 5.994 | 3.870 |
| 23 | Marseille | 10.850 | 5.074 | 3.541 |
| 24 | Paris | 10.724 | 6.085 | 3.331 |
| 25 | Berlin | 10.277 | 6.126 | 3.959 |
| 26 | Bern | 11.478 | 6.778 | 4.355 |
| 27 | Bonn | 10.945 | 5.023 | 3.753 |
| 28 | Hamburg | 9.938 | 7.639 | 4.108 |
| 29 | Geneva | 8.166 | 5.370 | 4.333 |
| 30 | Amsterdam | 8.216 | 5.898 | 3.331 |
| 31 | Den Haag | 8.216 | 6.546 | 3.331 |
| 32 | Frankfurt | 7.660 | 4.037 | 1.065 |
| | EROPA UTARA | | | |
| 33 | Kopenhagen | 9.696 | 4.920 | 3.730 |
| 34 | Helsinki | 10.023 | 5.931 | 3.681 |
| 35 | Stockholm | 9.917 | 5.506 | 3.433 |
| 36 | London | 11.410 | 7.293 | 4.153 |
| 37 | Oslo | 9.856 | 4.773 | 4.049 |
| | EROPA SELATAN | | | |
| 38 | Sarajevo | 11.778 | 7.129 | 6.033 |
| 39 | Zagreb | 16.974 | 10.177 | 5.182 |
| 40 | Athens | 14.911 | 9.256 | 8.041 |
| 41 | Lisbon | 9.309 | 4.746 | 3.383 |
| 42 | Madrid | 10.393 | 5.085 | 3.631 |
| 43 | Roma | 10.000 | 6.000 | 4.500 |
| 44 | Beograd | 10.318 | 6.404 | 5.564 |
| 45 | Vatikan | 10.000 | 6.000 | 4.500 |
| | EROPA TIMUR | | | |
| 46 | Bratislava | 7.125 | 4.423 | 3.842 |
| 47 | Bucharest | 8.839 | 4.982 | 4.113 |
| 48 | Kiev | 10.860 | 6.029 | 5.193 |
| 49 | Moskow | 9.537 | 7.206 | 5.143 |
| 50 | Praha | 19.318 | 11.848 | 6.748 |
| 51 | Sofia | 7.473 | 6.346 | 3.612 |
| 52 | Warsawa | 10.777 | 5.052 | 3.447 |
| 53 | Budapest | 8.839 | 5.979 | 2.187 |

| NO | KOTA | BESARAN | | |
|----|-----------------------|-----------|--------|---------|
| | | EKSEKUTIF | BISNIS | EKONOMI |
| | AFRIKA BARAT | | | |
| 54 | Dakkar | 12.900 | 9.848 | 8.555 |
| 55 | Abuja | 10.281 | 7.848 | 6.818 |
| 56 | Yaouidei | 10.281 | 7.848 | 6.818 |
| | AFRIKA TIMUR | | | |
| 57 | Addis Ababa | 7.700 | 5.808 | 5.552 |
| 58 | Nairobi | 8.732 | 7.966 | 6.081 |
| 59 | Antananarivo | 11.779 | 9.000 | 8.282 |
| 60 | Dar Es Salaam | 8.947 | 6.599 | 5.733 |
| 61 | Harare | 11.118 | 10.600 | 5.747 |
| | AFRIKA SELATAN | | | |
| 62 | Windhoek | 18.241 | 11.774 | 7.510 |
| 63 | Cape Town | 17.182 | 9.703 | 8.429 |
| 64 | Johannesburg | 12.943 | 9.802 | 7.216 |
| 65 | Maputo | 11.255 | 8.524 | 6.275 |
| 66 | Pretoria | 12.943 | 9.802 | 7.216 |
| | AFRIKA UTARA | | | |
| 67 | Algiers | 9.536 | 6.593 | 5.710 |
| 68 | Kairo | 8.683 | 7.122 | 4.483 |
| 69 | khartoum | 5.904 | 4.507 | 3.915 |
| 70 | Rabbat | 8.910 | 7.721 | 5.665 |
| 71 | Tripoli | 6.551 | 5.706 | 4.975 |
| 72 | Tunisia | 9.419 | 5.018 | 3.619 |
| | ASIA BARAT | | | |
| 73 | Manama | 6.573 | 6.154 | 4.827 |
| 74 | Baghdad | 5.433 | 4.148 | 3.545 |
| 75 | Amman | 7.561 | 6.431 | 3.545 |
| 76 | Kuwai | 6.771 | 4.273 | 3.110 |
| 77 | Beirut | 7.703 | 4.490 | 3.730 |
| 78 | Doha | 5.216 | 3.639 | 2.745 |
| 79 | Damaskus | 8.684 | 5.390 | 3.325 |
| 80 | Ankara | 9.449 | 6.643 | 3.581 |
| 81 | Abu Dhabi | 5.283 | 4.976 | 2.727 |
| 82 | Sanaa | 8.205 | 5.878 | 3.679 |
| 83 | Jeddah | 6.446 | 3.785 | 3.321 |
| 84 | Muscat | 6.469 | 5.156 | 3.727 |
| 85 | Riyadh | 5.359 | 3.510 | 3.000 |
| 86 | Istanbul | 11.061 | 4.435 | 2.467 |
| 87 | Dubai | 4.207 | 4.207 | 1.920 |

| NO | KOTA | BESARAN | | |
|-----|----------------------|-----------|--------|---------|
| | | EKSEKUTIF | BISNIS | EKONOMI |
| | ASIA TENGAH | | | |
| 88 | Tashkent | 13.617 | 8.453 | 7.343 |
| 89 | Astana | 13.661 | 12.089 | 8.962 |
| 90 | Baku | 13.234 | 8.556 | 2.281 |
| | ASIA TIMUR | | | |
| 91 | Beijing | 2.595 | 2.140 | 1.623 |
| 92 | Hongkong | 3.028 | 2.633 | 1.257 |
| 93 | Osaka | 3.204 | 2.686 | 1.864 |
| 94 | Tokyo | 3.734 | 2.675 | 1.835 |
| 95 | Pyongyang | 4.040 | 2.220 | 1.660 |
| 96 | Seoul | 3.233 | 2.966 | 1.737 |
| 97 | Shanghai | 3.122 | 2.749 | 1.304 |
| 98 | Guangzhou | 3.122 | 2.749 | 1.304 |
| | ASIA SELATAN | | | |
| 99 | Kabul | 6.307 | 3.905 | 3.208 |
| 100 | Teheran | 5.800 | 4.600 | 3.200 |
| 101 | Kolombo | 3.119 | 2.562 | 1.628 |
| 102 | Dhaka | 3.063 | 2.843 | 1.092 |
| 103 | Islamabad | 5.482 | 3.333 | 2.501 |
| 104 | Karachi | 4.226 | 3.633 | 2.321 |
| 105 | New Delhi | 3.500 | 2.500 | 1.500 |
| 106 | Mumbai | 3.063 | 2.417 | 1.092 |
| | ASIA TENGGARA | | | |
| 107 | Bandar Seri Bagawan | 1.628 | 1.147 | 919 |
| 108 | Bangkok | 2.344 | 2.104 | 823 |
| 109 | Davao City | 2.757 | 2.558 | 1.641 |
| 110 | Dilli | 747 | 491 | 350 |
| 111 | Hanoi | 1.833 | 1.833 | 1.656 |
| 112 | Ho Chi Minh | 1.677 | 1.503 | 1.235 |
| 113 | Johor Bahru | 1.195 | 911 | 525 |
| 114 | Kota Kinabalu | 1.894 | 1.425 | 694 |
| 115 | Kuala Lumpur | 1.158 | 659 | 594 |
| 116 | Kuching | 2.659 | 1.900 | 364 |
| 117 | Manila | 2.453 | 1.678 | 1.150 |
| 118 | Penang | 918 | 766 | 545 |
| 119 | Phnom Penh | 2.202 | 1.981 | 1.637 |
| 120 | Singapura | 991 | 673 | 403 |
| 121 | Vientiane | 2.274 | 2.025 | 1.420 |
| 122 | Yangon | 1.468 | 1.212 | 1.053 |
| 123 | Tawau | 1.894 | 1.427 | 694 |

| NO | KOTA | BESARAN | | |
|-----|---------------------|-----------|--------|---------|
| | | EKSEKUTIF | BISNIS | EKONOMI |
| 124 | Songkhla | 2.344 | 1.155 | 823 |
| | ASIA PASIFIK | | | |
| 125 | Canberra | 6.304 | 6.304 | 2.500 |
| 126 | Darwin | 6.689 | 4.900 | 3.964 |
| 127 | Melbourne | 4.886 | 3.814 | 2.858 |
| 128 | Noumea | 6.940 | 5.917 | 1.916 |
| 129 | Perth | 5.771 | 1.801 | 1.525 |
| 130 | Port Moresby | 17.090 | 13.835 | 8.252 |
| 131 | Suva | 12.668 | 4.461 | 2.669 |
| 132 | Sydney | 4.629 | 4.237 | 2.557 |
| 133 | Vanimo | 3.318 | 2.740 | 2.380 |
| 134 | Wellington | 11.750 | 9.830 | 4.120 |



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SATUAN BIAYA LEMBUR

Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap OPD. Pemberian dan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang lembur tidak dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kriterianya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020.
- b. Uang Lembur dapat diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- c. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Non Penerima TPP dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang berwenang.
- d. Uang Makan Lembur diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur selama paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari (Pemberian Uang Makan Lembur dapat diberikan dalam bentuk Natura dan menurut kemampuan anggaran).
- e. Uang Makan lembur dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dengan memperhatikan ketentuan pada point huruf d dan melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang berwenang.

1. Standar Uang Lembur :

- | | |
|----------------|--------------------------|
| - Golongan IV | : Rp 36.000,- Orang/Jam |
| - Golongan III | : Rp 30.000,- Orang/Jam |
| - Golongan II | : Rp 24.000,- Orang/Jam |
| - Golongan I | : Rp 18.000,- Orang/Jam |
| - Non ASN | : Rp. 18.000,- Orang/Jam |

2. Stándar Uang Makan Lembur :

- Golongan IV : Rp 41.000,- Orang/Hari
- Golongan III : Rp 37.000,- Orang/Hari
- Golongan II dan I : Rp 35.000,- Orang/Hari
- Non ASN : Rp. 31.000,- Orang/Hari

- f. SPJ Kelengkapan Kegiatan Lembur disertai dengan Laporan Hasil Lembur
- g. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.

The stamp is circular with a purple ink. It features a central emblem of a Garuda bird with wings spread, perched on a pedestal. The emblem is surrounded by a circular border containing the text 'BUPATI JEMBER' at the top and 'JEMBER' at the bottom, separated by two stars. A blue ink signature is written over the stamp, starting from the top and ending at the bottom right.
BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

1.1 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

1. Biaya sewa kendaraan termasuk bahan bakar dan pengemudi dibayarkan sesuai biaya at cost/riil.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas lebih dari 7 (tujuh seat) dapat diberikan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pejabat Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/ Pimpinan Lembaga setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/ bersifat at cost/riil.

Mekanisme sewa kendaraan insidentil mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL

| NO. | PROVINSI | SATUAN | RODA 4 | RODA 6/BUS SEDANG | RODA 6/BUS BESAR |
|-----|----------------|----------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | Banten | Per hari | Rp.1.070.000 | Rp.3.208.000 | Rp.4.368.000 |
| 2 | Jawa Barat | Per hari | Rp. 988.000 | Rp.2.563.000 | Rp.3.602.000 |
| 3 | Dki Jakarta | Per hari | Rp.1.305.000 | Rp.2.816.000 | Rp.3.938.000 |
| 4 | Jawa Tengah | Per hari | Rp.1.374.000 | Rp.3.063.000 | Rp.4.492.000 |
| 5 | D.I.Yogyakarta | Per hari | Rp. 978.000 | Rp.2.570.000 | R.p3.808.000 |
| 6 | Jawa Timur | Per hari | Rp.1.212.000 | Rp.2.446.000 | Rp.3.303.000 |
| 7 | Bali | Per hari | Rp.1.275.000 | Rp.3.174.000 | Rp.4.224.000 |

1.2 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR/ LAPANGAN

Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa ketentuan yakni :

- a. Sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan yang dimaksud tidak dapat di alokasikan biaya pemeliharaan.
- b. Penggunaan sewa kendaraan operasional kantor/lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Sewa kendaraan operasional kantor/lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Satuan biaya sewa kendaraan dan mekanisme sewa kendaraan operasional kantor/lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional kantor/lapangan terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR/
LAPANGAN

| NO. | URAIAN | SATUAN | MINIBUS |
|-----|------------|-----------|---------------|
| 1 | Jawa Timur | Per bulan | Rp. 6.201.000 |

1.3 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Ketentuan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/ operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang

milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|-----------|----------------|
| 1 | ESELON IIa (Sekda) | Per bulan | Rp. 14.236.000 |
| 2 | ESELON IIb (KEPALA OPD, ASISTEN dan STAF AHLI) | Per bulan | Rp. 10.889.100 |
| 3 | ESELON IIIa | Per bulan | Rp. 6.201.000 |


BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SATUAN BIAYA TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG KUALIFIKASI AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
 - 1.1 Biaya Tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi nasional disusun berdasarkan :
 - a. Kualifikasi ahli;
 - b. Tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
 - c. Tingkat pendidikan strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3)
 - 1.2 Biaya tenaga ahli konstruksi nasional pada jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi internasional disusun berdasarkan :
 - a. Tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*)
 - b. Tingkat pendidikan S1, S2, S3.
 - 1.3 Biaya Tenaga Konstruksi Asing pada jenjang kualifikasi disetarakan ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional disusun berdasarkan :
 - a. Tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*)
 - b. Tingkat pendidikan S1, S2, S3.
 - 1.4 Upah pokok yang dibayarkan tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang kualifikasi ahli sebesar minimal :
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya minimal tenaga ahli tetap;
 - b. 55% (lima puluh lima persen) dari besaran biaya minimal tenaga ahli tidak tetap.

TABEL 2

Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

| Pengalaman* (Thn) | S1 / Setara** (Rp) Per bulan | S2 / Setara** (Rp) Per bulan | S3 / Setara** (Rp) Per bulan |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 36.000.000 | 61.600.000 | 65.300.000 |
| 2 | 42.600.000 | 68.200.000 | 72.200.000 |
| 3 | 49.200.000 | 74.900.000 | 79.300.000 |
| 4 | 55.800.000 | 81.200.000 | 86.200.000 |
| 5 | 62.200.000 | 87.800.000 | 93.100.000 |
| 6 | 68.800.000 | 94.400.000 | 100.200.000 |
| 7 | 75.400.000 | 101.000.000 | 107.100.000 |
| 8 | 82.000.000 | 107.600.000 | 114.000.000 |
| 9 | 88.300.000 | 114.200.000 | 121.100.000 |
| 10 | 94.900.000 | 120.600.000 | 128.000.000 |
| 11 | 101.500.000 | 127.200.000 | 134.900.000 |
| 12 | 108.200.000 | 133.800.000 | 141.700.000 |
| 13 | 114.500.000 | 140.400.000 | 148.900.000 |
| 14 | 121.100.000 | 147.000.000 | 155.700.000 |
| 15 | 127.700.000 | 153.600.000 | 162.600.000 |
| 16 | 134.300.000 | 160.000.000 | 169.700.000 |
| 17 | 140.700.000 | 166.600.000 | 176.600.000 |
| 18 | 147.300.000 | 173.200.000 | 183.500.000 |
| 19 | 153.900.000 | 179.800.000 | 190.600.000 |
| 20 | 160.500.000 | 186.400.000 | 197.500.000 |
| 21 | 166.800.000 | 192.700.000 | 204.400.000 |
| 22 | 173.400.000 | 199.300.000 | 211.200.000 |
| 23 | 180.100.000 | 206.000.000 | 218.400.000 |
| 24 | 186.700.000 | 212.600.000 | 225.200.000 |
| 25 | 193.000.000 | 219.200.000 | 232.100.000 |

TABEL 2

Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

| Pengalaman* (Thn) | S1 / Setara** (Rp) Per bulan | S2 / Setara** (Rp) Per bulan | S3 / Setara** (Rp) Per bulan |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 36.000.000 | 61.600.000 | 65.300.000 |
| 2 | 42.600.000 | 68.200.000 | 72.200.000 |
| 3 | 49.200.000 | 74.900.000 | 79.300.000 |
| 4 | 55.800.000 | 81.200.000 | 86.200.000 |
| 5 | 62.200.000 | 87.800.000 | 93.100.000 |
| 6 | 68.800.000 | 94.400.000 | 100.200.000 |
| 7 | 75.400.000 | 101.000.000 | 107.100.000 |
| 8 | 82.000.000 | 107.600.000 | 114.000.000 |
| 9 | 88.300.000 | 114.200.000 | 121.100.000 |
| 10 | 94.900.000 | 120.600.000 | 128.000.000 |
| 11 | 101.500.000 | 127.200.000 | 134.900.000 |
| 12 | 108.200.000 | 133.800.000 | 141.700.000 |
| 13 | 114.500.000 | 140.400.000 | 148.900.000 |
| 14 | 121.100.000 | 147.000.000 | 155.700.000 |
| 15 | 127.700.000 | 153.600.000 | 162.600.000 |
| 16 | 134.300.000 | 160.000.000 | 169.700.000 |
| 17 | 140.700.000 | 166.600.000 | 176.600.000 |
| 18 | 147.300.000 | 173.200.000 | 183.500.000 |
| 19 | 153.900.000 | 179.800.000 | 190.600.000 |
| 20 | 160.500.000 | 186.400.000 | 197.500.000 |
| 21 | 166.800.000 | 192.700.000 | 204.400.000 |
| 22 | 173.400.000 | 199.300.000 | 211.200.000 |
| 23 | 180.100.000 | 206.000.000 | 218.400.000 |
| 24 | 186.700.000 | 212.600.000 | 225.200.000 |
| 25 | 193.000.000 | 219.200.000 | 232.100.000 |

TABEL 3
Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada
Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional
Atau Seleksi Internasional

| Pengalaman* (Thn) | S1 / Setara** (Rp) Per bulan | S2 / Setara** (Rp) Per bulan | S3 / Setara** (Rp) Per bulan |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 98.254.300 | 168.013.900 | 178.115.700 |
| 2 | 116.170.700 | 185.739.700 | 196.985.100 |
| 3 | 134.087.100 | 203.560.800 | 215.949.800 |
| 4 | 151.717.600 | 221.477.200 | 234.819.200 |
| 5 | 169.538.700 | 239.393.600 | 253.688.600 |
| 6 | 187.455.100 | 257.214.700 | 272.843.900 |
| 7 | 205.371.500 | 275.131.100 | 291.713.300 |
| 8 | 223.002.000 | 293.047.500 | 310.678.000 |
| 9 | 240.823.100 | 310.868.600 | 329.547.400 |
| 10 | 258.739.500 | 328.785.000 | 348.416.800 |
| 11 | 276.655.900 | 346.701.400 | 367.286.200 |
| 12 | 294.286.400 | 364.522.500 | 386.441.500 |
| 13 | 312.107.500 | 382.153.000 | 405.310.900 |
| 14 | 330.023.900 | 400.355.300 | 424.275.600 |
| 15 | 347.940.300 | 418.176.400 | 443.145.000 |
| 16 | 365.570.800 | 435.806.900 | 462.014.400 |
| 17 | 383.391.900 | 453.723.300 | 480.883.800 |
| 18 | 401.308.300 | 471.639.700 | 499.848.500 |
| 19 | 418.938.800 | 489.460.800 | 518.908.500 |
| 20 | 436.855.200 | 507.377.200 | 537.873.200 |
| 21 | 454.676.300 | 525.293.600 | 556.742.600 |
| 22 | 472.592.700 | 543.114.700 | 575.612.000 |
| 23 | 490.223.200 | 561.031.100 | 594.481.400 |
| 24 | 508.139.600 | 578.947.500 | 613.446.100 |
| 25 | 525.960.700 | 596.768.600 | 632.601.400 |


BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SATUAN BIAYA UPAH

- 1.1 Biaya upah diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Database BKN dan Non Database BKN) yang sedang menunggu proses menjadi PPPK Paruh Waktu. Biaya upah dibayarkan maksimal sesuai ketentuan standart biaya upah yang di atur dalam Peraturan Bupati ini.
- 1.2 Untuk Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Database BKN dan Non Database BKN) yang sedang menunggu proses menjadi PPPK Paruh Waktu, OPD dapat mengalokasikan tambahan upah sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

TABEL 1.1
TABEL SATUAN BIAYA UPAH PEGAWAI NON ASN
DATABASE / NON DATABASE BKN

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|--------|------------------|
| 1 | UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN | | |
| | Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 0-5th | OB | Rp. 1.000.000,00 |
| | Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 6-10th | OB | Rp. 1.250.000,00 |
| | Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10 | OB | Rp. 1.500.000,00 |
| | Ijasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0-5th | OB | Rp. 2.000.000,00 |
| | Ijasah SMA / Sederajat Masa Kerja 6-10th | OB | Rp. 2.150.000,00 |
| | Ijasah SMA / Sederajat Masa Kerja >10 | OB | Rp. 2.300.000,00 |
| | Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja 0-5th | OB | Rp. 2.300.000,00 |
| | Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja 6-10th | OB | Rp. 2.400.000,00 |
| | Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja >10 | OB | Rp. 2.500.000,00 |
| | Ijasah S1 Masa Kerja 0-5th | OB | Rp. 2.500.000,00 |
| | Ijasah S1 Masa Kerja 6-10th | OB | Rp. 2.750.000,00 |
| | Ijasah S1 Masa Kerja >10 | OB | Rp. 2.900.000,00 |
| | Ijasah S2 Masa Kerja 0-5th | OB | Rp. 2.900.000,00 |
| | Ijasah S2 Masa Kerja 6-10th | OB | Rp. 3.100.000,00 |
| | Ijasah S2 Masa Kerja >10 | OB | Rp. 3.250.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|--------|------------------|
| | Ijasah S3 Masa Kerja 0-5th | OB | Rp. 3.250.000,00 |
| | Ijasah S3 Masa Kerja 6-10th | OB | Rp. 3.400.000,00 |
| | Ijasah S3 Masa Kerja >10 | OB | Rp. 3.600.000,00 |
| 2 | UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN TENAGA PENDIDIKAN GTT | | |
| | Ijasah DII/DIII/S1/S2Masa Kerja 0-5th | OB | Rp. 1.200.000,00 |
| | Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 6-11th | OB | Rp. 1.400.000,00 |
| | Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 12 - 17 Tahun | OB | Rp. 1.600.000,00 |
| | Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 18 - 23 Tahun | OB | Rp. 1.800.000,00 |
| | Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 24-29 Tahun | OB | Rp. 2.000.000,00 |
| | Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja >30 Tahun | OB | Rp. 2.200.000,00 |
| 3 | UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN TENAGA PENDIDIKAN PTT | | |
| | Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 0-5 Tahun | OB | Rp. 1.200.000,00 |
| | Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 6-11 tahun | OB | Rp. 1.400.000,00 |
| | Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 12-17 Tahun | OB | Rp. 1.600.000,00 |
| | Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 18 sd 23 Tahun | OB | Rp. 1.800.000,00 |
| | Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 24 sd 29 Tahun | OB | Rp. 2.000.000,00 |
| | Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja > 30 Tahun | OB | Rp. 2.200.000,00 |
| 4 | UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN TENAGA KESEHATAN /PROFESI | | |
| | Dokter / Drg Sub Specialis SP2 (Profesi) | OB | Rp. 3.550.000,00 |
| | Dokter / Drg Specialis SP1 (Profesi) | OB | Rp. 3.150.000,00 |
| | Dokter Umum (Profesi) | OB | Rp. 2.950.000,00 |
| | Psikolog Klinis / Apoteker / Keperawatan / Kebidanan Specialis (S2 Magister Profesi) | OB | Rp. 2.850.000,00 |
| | Apoteker (Profesi) | OB | Rp. 2.800.000,00 |
| | Profesi (S1) Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan/Gizi/KeterampilanFisik/Teknisi anMedik/TeknikBiomedika/Tenaga Kesehatan Tradisional/ Tenaga Kesehatan Lainnya/Non Nakes. | OB | Rp. 2.280.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|--|--------|------------------|
| | Diploma 1-3D/D4 Terapan Perawat/ Bidan/Kefarmasian/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan/Gizi Nutrisionis/Keterampilan Fisik/Keteknisian Medik/Teknik Biomedika/Tenaga Kesehatan Tradisional/Tenaga Kesehatan Lainnya/Non Tenaga Kesehatan. | OB | Rp. 2.100.000,00 |
| | SD/SLTA/SMK Kesehatan/Non Kesehatan (Asisten Tenaga Kesehatan) | OB | Rp. 1.680.000,00 |
| | Administrasi Kesehatan : | | |
| | Ijazah D3 Masa Kerja 0-5 Tahun | OB | Rp. 2.700.000,00 |
| | Ijazah D3 Masa Kerja 6-10 Tahun | OB | Rp. 2.800.000,00 |
| | Ijazah D3 > 10 Tahun | OB | Rp. 2.900.000,00 |
| | Ijazah D4/S1 Masa Kerja 0-5 Tahun | OB | Rp. 2.950.000,00 |
| | Ijazah D4/S1 Masa Kerja 6-10 Tahun | OB | Rp. 3.100.000,00 |
| | Ijazah D4/S1 > 10 Tahun | OB | Rp. 3.250.000,00 |
| 5 | UPAH PEGAWAI DATABASE / NON DATABASE BKN BANPOL PP | | |
| | Ijazah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1 | OB | Rp. 2.300.000,00 |



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SATUAN BIAYA PENGADAAN TANAH

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Bagi OPD yang membutuhkan tanah perlu menganggarkan biaya :

1. Pengukuran dan pemetaan tanah
2. Pemberian ganti rugi kepada pemilik
3. Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.
4. Pengurusan hak atas tanah
5. Penitipan ganti rugi apabila diperlukan
6. Pemisahan dari sisa bagian tanah pemilik
7. Dalam rangka pembinaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi dan penyelesaian dan
8. Lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten

Ketentuan biaya Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf C, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. Biaya operasional dan biaya pendukung digunakan untuk kegiatan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.
- b. Kegiatan tahapan perencanaan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri atas:
 - 1) Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah;
 - 2) Koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - 3) Membuat analisa rencana pembangunan;
 - 4) Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;
 - 5) Melakukan kajian oleh lembaga profesional;
 - 6) Merumuskan rencana pengadaan tanah;

- 7) Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;
 - 8) Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - 9) Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;
 - 10) Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;
 - 11) Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah;
 - 12) Melakukan analisa waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah yang meliputi:
 - a) persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b) pelaksanaan pengadaan tanah;
 - c) penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
 - d) pelaksanaan pembangunan;
 - 13) Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;
 - 14) Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian analisa mengenai dampak lingkungan;
 - 15) Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;
 - 16) Melakukan perhitungan ganti kerugian ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
 - 17) Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;
 - 18) Melakukan perhitungan alokasi anggaran yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, dan sosialisasi;
 - 19) Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; dan
 - 20) Melakukan analisa dan manfaat pembangunan.
- c. Kegiatan tahapan persiapan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri atas:
- 1) Pemberitahuan rencana pembangunan;
 - 2) Pendataan awal lokasi;
 - 3) Konsultasi publik/konsultasi publik ulang;
 - 4) Penetapan lokasi;
 - 5) Pengumuman penetapan lokasi;

- 6) Menerima keberatan pihak yang berhak;
 - 7) Melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak;
 - 8) Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;
 - 9) Proses beracara di pengadilan tata usaha negara atas keberatan dari pihak yang berhak; dan
 - 10) Proses beracara di mahkamah agung atas keberatan dari pihak yang berhak.
- d. Kegiatan tahapan pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri atas:
- 1) Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - 2) Pemberitahuan kepada pihak yang berhak;
 - 3) Inventarisasi aspek fisik;
 - 4) Identifikasi aspek yuridis;
 - 5) Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;
 - 6) Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satgas;
 - 7) Penunjukan jasa penilai atau penilai publik dan pengumuman penilai;
 - 8) Menilai dan membuat berita acara penilaian;
 - 9) Musyawarah dengan masyarakat;
 - 10) Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran;
 - 11) Proses beracara di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung; dan
 - 12) Penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.
- e. Kegiatan tahapan penyerahan hasil, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri atas:
- 1) Penyerahan hasil pengadaan tanah;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi; dan
 - 3) Sertifikasi.
- f. Kegiatan administrasi dan pengelolaan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, meliputi biaya administrasi dan pengelolaan untuk mendukung tertib administrasi dan tertib pengelolaan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- g. Kegiatan sosialisasi, sebagaimana dijelaskan pada butir a, meliputi biaya pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka mengenai rencana pembangunan yang dilakukan oleh tim persiapan baik secara langsung maupun tidak langsung baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Biaya operasional dan pendukung untuk kegiatan pada tahapan perencanaan dan persiapan ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur yang mempedomani standar harga satuan yang berlaku. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK/2013, berdasarkan perhitungan dimulai 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut :

TABEL 1.1
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPETINGAN
UMUM PADA TAHAPAN DAN PENYERAHAN HASIL

| | |
|--------------------------------------|--|
| s/d Rp 10 miliar | = (4% x ≤ Rp 10 miliar) |
| Diatas Rp 10 miliar s/d Rp15 miliar | = (Rp.400.000.000) +(3% x Rp 5 miliar) |
| Diatas Rp15 miliar s/d Rp30 miliar | = (550.000.000) + (2% x Rp15 miliar) |
| Diatas Rp30 miliar s/d Rp50 miliar | = (850.000.000) +(1% x Rp 20 miliar) |
| Diatas Rp50 miliar s/d Rp100 miliar | = (1.050.000.000) + (0,50% x 50 miliar) |
| Diatas Rp100 miliar s/d Rp250 miliar | = (1.300.000.000) + (0,25% x 150 miliar) |
| Diatas Rp250 miliar s/d Rp500 miliar | = (1.675.000.000) + (0,20% x 250 miliar) |
| Diatas Rp 500 miliar | = (2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai Ganti kerugian tanah - 500 miliar) |

Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai).

CONTOH PENERAPAN :

Pengadaan tanah bagi Pembangunan kepentingan umum dengan nilai Ganti kerugian tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), besaran biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) Adalah sebagai berikut :

| | | |
|------|---|---|
| BOBP | = | (Rp. 2.175.000.000) +(0,15% x (Nilai Ganti kerugian tanah – Rp.500 miliar)) |
| | = | (Rp. 2.175.000.000) +(0,15% x (Rp. 1 triliun – Rp.500 miliar)) |
| | = | (Rp. 2.175.000.000) +(0,15% x Rp.500 miliar) |
| | = | Rp. 2.175.000.000 + Rp. 750.000.000 |
| | = | Rp. 2.925.000.000 |

TABEL 1.2
STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN,
PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN SATUAN TUGAS

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|-----|---|------------------|------------------|
| I | Ganti rugi tanah s/d Rp10 miliar | | |
| | Ketua merangkap anggota | OB per Paket | Rp 1.600.000,00 |
| | Sekretaris merangkap anggota | OB per Paket | Rp 1.300.000,00 |
| | Anggota | OB per Paket | Rp 1.100.000,00 |
| | Sekretariat | OB per Paket | Rp 800.000,00 |
| II | Ganti Rugi Tanah diatas Rp10 miliar s/d Rp50 miliar | | |
| | Ketua merangkap anggota | OB per Paket | Rp 2.400.000,00 |
| | Sekretaris merangkap anggota | OB per Paket | Rp 1.900.000,00 |
| | Anggota | OB per Paket | Rp 1.600.000,00 |
| | Sekretariat | OB per Paket | Rp 900.000,00 |
| III | Ganti rugi tanah diatas Rp50 miliar | | |
| | Ketua merangkap anggota | OB per Paket | Rp 3.700.000,00 |
| | Sekretaris merangkap anggota | OB per Paket | Rp 2.900.000,00 |
| | Anggota | OB per Paket | Rp 2.400.000,00 |
| | Sekretariat | OB per Paket | Rp 1.000.000,00 |
| IV | TIM KAJIAN | | |
| | Ketua merangkap anggota | Per Hasil Kajian | Rp. 1.100.000,00 |
| | Sekretaris merangkap anggota | Per Hasil Kajian | Rp. 800.000,00 |
| | Anggota | Per Hasil Kajian | Rp. 750.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|----|--------------|--------|---|
| V | SATUAN TUGAS | | <p>Mengacu pada ketentuan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional; dan3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional. |



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1.1 Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi:
 - a. Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional;
 - b. Staf Pemerintah Daerah (PNS, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak/P3K dan Non PNS);
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - d. Unsur lainnya seperti tenaga ahli, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
- 1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tersebut angka 1 yang diselenggarakan oleh OPD selain Badan Kepegawaian Kabupaten Jember, agar dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin dari Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
- 1.3 Dalam kondisi tertentu, penyelenggaraan diklat dapat dilaksanakan di luar Pusdiklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
- 1.4 Biaya Penyelenggaraan Diklat Prajabatan/Latihan Dasar untuk CPNS/PPPK/K2/K1/Pejabat Fungsional dari pengadaan PNS Umum disesuaikan dengan tarif Badan Diklat Terakreditasi.
- 1.5 Biaya Penyertaan Diklat Struktural/Teknis/Fungsional disesuaikan dengan tarif Badan Diklat Terakreditasi.
- 1.6 Biaya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Benchmarking / OL / Study Banding Kegiatan Diklat Teknis / Fungsional / Kepemimpinan di Locus tempat yang dikunjungi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-/Locus
- 1.7 Belanja Konsumsi peserta pendidikan dan pelatihan per hari per orang ditetapkan :
 - a. Diklat yang dilaksanakan di hotel dalam kota Rp. 1.300.000,- / Orang Hari
 - b. Diklat yang dilaksanakan di hotel luar kota Rp. 1.900.000,- / Orang Hari

- 1.8 Khusus untuk penyelenggaraan diklat yang menggunakan pola kemitraan/ bekerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur/ daerah lain/ Instansi/lembaga lain menyesuaikan pola kemitraan dengan pihak penyelenggara pada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.10.000.000,- / angkatan
- 1.9 Biaya / Tarif / Honor Penilaian Kompetensi (Competence Assesment) / Panitia Seleksi Jabatan menyesuaikan Pola kemitraan dengan pihak penyelenggara Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur.
- 1) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi (Assesment) Level Pelaksana / JF Terampil
 - a. Group peserta sampai dengan 20 orang Rp. 3.000.000,- / Peserta.
 - b. Group peserta sampai dengan 30 orang Rp. 2.000.000,- / Peserta.
 - c. Group peserta diatas 30 orang Rp. 1.500.000,- / Peserta.
 - 2) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi (Assesment) Level Pengawas / JF Ahli Pertama
 - a. Group peserta sampai dengan 10 orang Rp. 6.000.000,- / Peserta.
 - b. Group peserta sampai dengan 30 orang Rp. 3.000.000,- / Peserta.
 - c. Group peserta diatas 30 orang Rp. 2.000.000,- / Peserta.
 - 3) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi (Assesment) Level Administrator / JF Ahli Muda
 - a. Group peserta sampai dengan 10 orang Rp. 7.000.000,- / Peserta.
 - b. Group peserta sampai dengan 30 orang Rp. 4.000.000,- / Peserta.
 - c. Group peserta diatas 30 orang Rp. 3.000.000,- / Peserta.
 - 4) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi (Assesment) Level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / JF Ahli Madya
 - a. Group peserta sampai dengan 12 orang Rp. 6.000.000,- / Peserta
 - b. Group peserta sampai dengan 20 orang Rp. 5.000.000,- / Peserta
- 1.10 Honorarium penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|-----------|-----------------|
| 1 | Honorarium Penceramah | OJP | Rp. 1.000.000,- |
| 2 | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara | OJP | Rp. 300.000,- |
| 3 | Honorarium Pengajar yang berasal dalam satuan kerja penyelenggara | OJP | Rp. 200.000,- |
| 4 | Honorarium Penyusunan Modul Diklat | Per Modul | Rp. 5.000.000,- |

| | | | |
|---|--|----|---------------|
| 5 | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat | | |
| | a. Lama Diklat s.d 5 hari | | |
| | 1) Penanggung jawab | OK | Rp. 450.000,- |
| | 2) Ketua / Wakil Ketua | OK | Rp. 400.000,- |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp. 300.000,- |
| | 4) Anggota | OK | Rp. 300.000,- |
| | b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari | | |
| | 1) Penanggung jawab | OK | Rp. 675.000,- |
| | 2) Ketua / Wakil Ketua | OK | Rp. 600.000,- |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp. 450.000,- |
| | 4) Anggota | OK | Rp. 450.000,- |
| | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari | | |
| | 1) Penanggung jawab | OK | Rp. 900.000,- |
| | 2) Ketua / Wakil Ketua | OK | Rp. 800.000,- |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp. 600.000,- |
| | 4) Anggota | OK | Rp. 600.000,- |

- 1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan / atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil tapping dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari luar satuan kerja penyelenggara; dan
 - b. Honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas / setara.
- 2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil *taping*.
- 3) Honorarium Pengajar yang berasal dalam satuan kerja penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil *taping*.

Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Honorarium Penyusun Modul Diklat dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang beri tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian horarium yang dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan prosentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 5) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan baik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merupakan tugas tambahan/ perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan ;
 - b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
 - c. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Ketentuan :

1. Jam Pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Panitia penyelenggara kegiatan diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*)

3. Penghitung lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan jumlah hari tatap muka (jalur pelatihan klasikal).
- 1.11 Biaya Kemitraan Kegiatan Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyesuaikan dengan Pola Kemitraan dengan pihak penyelenggara BPSDM Provinsi Jawa Timur.
 - a. Evaluasi Dampak Diklar Rp. 17.500.000 / angkatan
 - b. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi / Analisis kebutuhan Diklat Rp. 17.500.000 / Angkatan
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Pengawas Rp. 17.500.000,- / Angkatan
 - d. Pelatihan Teknis / Fungsional Rp. 10.000.000,- / Angkatan
 - e. Pelatihan Dasar CPNS Rp. 10.000.000,- / Angkatan
 - f. Pendampingan Workplace Learning Rp. 15.000.000,-
 - 1.12 Biaya Kemitraan Penyelenggara Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) :
 - a. Seleksi Pengembangan Karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam BKN
 - b. Seleksi Pengembangan Karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar BKNMenyesuaikan dengan pola Kemitraan dengan pihak penyelenggara BKN pelaksanaan di dalam BKN dan di luar BKN sebesar Rp. 150.000,-.



MUHAMMAD FAWAIT